

## Studi Pelingkupan

# KEADILAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM HIBAH PENELITIAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 2013-2015



### *Tim Studi:*

Eko Cahyono  
Ciptaningrat Larastiti  
Budiono Zaini  
Umi Latifah P  
Ikhsan Maulana





**Studi Pelingkupan**

# **KEADILAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM HIBAH PENELITIAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 2013-2015**



*Tim Studi:*

Eko Cahyono  
Ciptaningrat Larastiti  
Budiono Zaini  
Umi Latifah P  
Ikhsan Maulana

Sajogyo Institute  
Didukung oleh:  
Knowledge Sector Initiative (KSI)  
2017



# 1

## Ringkasan Eksekutif

Studi pelingkupan (*scoping study*) ini hendak melihat prinsip keadilan gender dan inklusi sosial (*gender equity and social inclusion/ GESI*) digunakan dalam penelitian di perguruan tinggi penerima hibah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 2013-2015. Konsep GESI merupakan seperangkat alat analisis untuk menelaah dampak relasi laki-laki dan perempuan serta relasi antarentitas di dalam masyarakat pada capaian pembangunan. Secara kritis penggunaan konsep GESI memosisikan relasi kuasa gender sebagai alat teropong atas hasil penelitian di perguruan tinggi yang menerima hibah riset dari Kemenristekdikti. Harapannya, studi ini bisa membuka ruang diskusi untuk perbaikan lanjutan dari implementasi hibah penelitian Kemenristekdikti tersebut. Selain itu, studi ini diharapkan membantu Kemenristekdikti dalam melihat perspektif GESI pada laporan penelitian yang sudah ada.

Tujuan studi pelingkupan ini untuk menjelaskan sejauh mana hibah Kemenristekdikti menyediakan ruang penelitian berperspektif GESI bagi perguruan tinggi Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan mendalami isi *Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX* periode 2013-2015 sebagai tolok ukur untuk membaca dan memetakan lebih jauh tema GESI pada laporan penelitian hibah. Sebab itu, studi ini menggunakan kajian meja sebagai metode penelitian dan analisis isi sebagai metode analisis yang memadukan triangulasi data kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan analisis studi ini, perspektif GESI belum benar-benar diakomodasi dalam periode hibah penelitian Kemenristekdikti 2013-2015. Penyebabnya ada tiga. *Pertama*, ruang penelitian Kemenristekdikti cenderung bias ilmu eksakta yang dianggap tidak terhubung dengan persoalan gender atau setidaknya dianggap netral gender. Akibatnya, isu gender tidak tampak dalam riset-riset ilmu eksakta. Di sisi lain, peneliti ilmu humaniora sulit mendapatkan peluang untuk mengeksplorasi tema-tema kritis seperti GESI. *Kedua*, penelitian Kemenristekdikti cenderung berorientasi pada pembangunan dan kebutuhan pasar terhadap penelitian unggul sebagai bagian dari invensi teknologi tepat guna. *Ketiga*, sekalipun ada, perspektif GESI dipahami secara naif dan kurang komprehensif oleh peneliti. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai objek pembangunan (penerima manfaat pasif) yang secara tersirat menyimpan stigma lemah, harus diatur, serta dianggap kurang terampil, alih-alih melakukan analisis kritis terhadap relasi kuasa berbasis gender yang memojokkan mereka dalam situasi tersebut. Melalui kajian ini, tim studi hendak mendorong rekomendasi taktis bagi Kemenristekdikti dalam kebijakan penelitiannya, yang meliputi: (1) melakukan tindakan afirmatif terhadap topik penelitian GESI dan peneliti perempuan, (2) menyiapkan pedoman penelitian yang lebih inklusif terhadap ilmu sosial-humaniora berperspektif GESI, (3) melangsungkan penelitian pilot yang kolaboratif, serta (4) menyelenggarakan lokakarya GESI untuk meningkatkan pemahaman terhadap metode penelitian berbasis GESI.

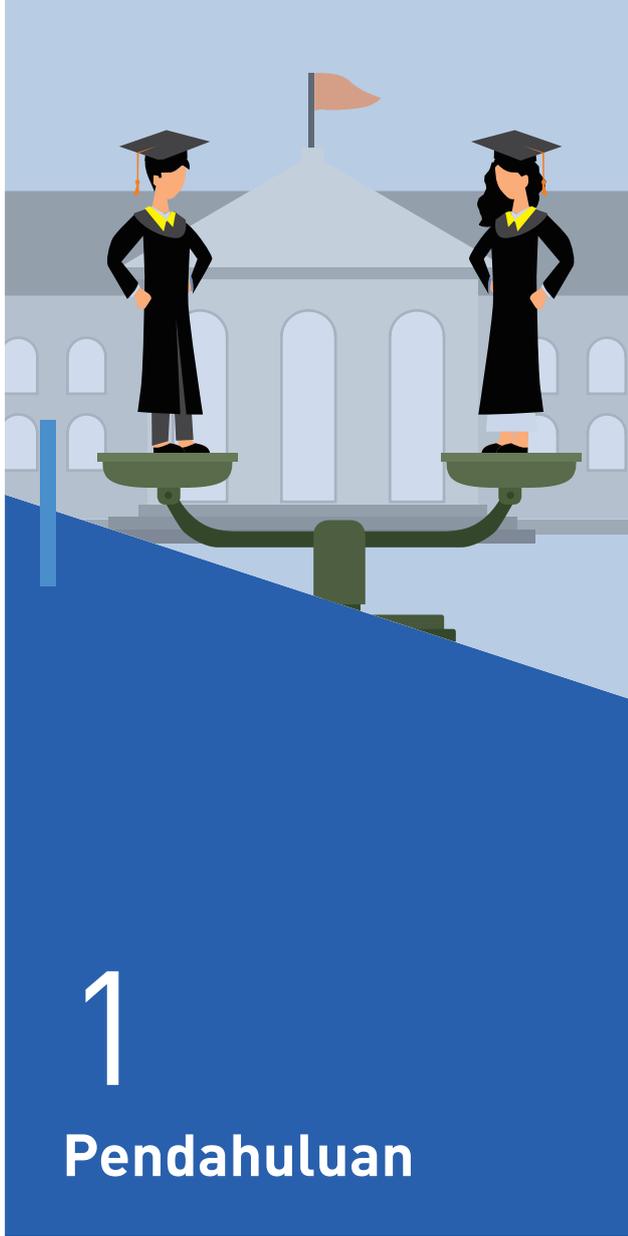
Bogor, 17 Agustus 2017

# GLOSARIUM

AAS	: Australian Academy of Science
AIPI	: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
ALMI	: Akademi Ilmuwan Muda Indonesia
CSR	: Corporate Social Responsibility
Ditlitabmas	: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
GAD	: Gender and Development
GESI	: Gender Equity and Social Inclusion
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hak Sipil	: Hak sipil dan politik, yakni hak internal individu yang hanya dapat dinikmati apabila negara bersikap pasif dan tidak melakukan intervensi terhadap individu
Hak Ekosob	: Hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak individu sebagai anggota masyarakat (sosial dan komunal) yang hanya terpenuhi apabila negara bersikap aktif dalam mengatur dan menjamin kesejahteraan masyarakat
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
SAGE	: Science in Australia Gender Equity, simposium dilaksanakan di Sydney, Australia
WID	: Women in Development

# DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif .....	2
Glosarium .....	4
Daftar Isi .....	5
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>6</b>
A. Latar Belakang .....	6
B. Pertanyaan Kajian .....	7
C. Tujuan Kajian.....	8
D. Kerangka Pikir .....	8
E. Riset sebagai Produksi Pengetahuan dengan Penggunaan Analisis Gender .....	8
<b>Bab II Ruang Riset Kemenristekdikti.....</b>	<b>12</b>
A. Kata Kunci dalam “Buku Panduan IX” .....	12
B. Menyoal Penelitian Terapan .....	21
<b>Bab III Elaborasi Visibilitas GESI dalam Laporan Penelitian Terpilih.....</b>	<b>27</b>
A. Membaca GESI dalam Riset Kemenristekdikti 2013-2015 .....	27
B. Hasil Analisis Kuantitatif Visibilitas GESI dalam Skema Penelitian Kemenristekdikti 2013-2015 .....	37
<b>Bab IV Diskusi, Refleksi, dan Rekomendasi.....</b>	<b>45</b>
Profil Penulis.....	49
Profil Sajogyo Institute .....	50
Daftar Pustaka .....	51



# 1

## Pendahuluan

*“Selama dua puluh tahun agenda pembangunan... masyarakat masih mengalami kesenjangan dan marginalisasi sosial terhadap kelompok atau komunitas tertentu yang kian melebar... sehingga membutuhkan strategi dan instrumen untuk melihat tantangan ini.”*

(Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Sekretariat Persatuan Bangsa-Bangsa, 2010)

### A. Latar Belakang

Narasi di atas merupakan latar belakang pentingnya strategi baru untuk mengatasi kesenjangan sosial dan eksklusifitas yang kian lebar. Sebagai sebuah strategi, keadilan gender dan inklusi sosial (*gender equity and social inclusion/GESI*) menekankan kepekaan terhadap dua hal. *Pertama*, peningkatan kesadaran terhadap persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, inklusi sosial sebagai perjuangan melawan eksklusifitas—yang didefinisikan Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai segala upaya untuk menghalangi partisipasi utuh dalam proses sosial dan politik individu dan kelompok sosial tertentu di masyarakat.<sup>1</sup> Lantas, sejauh mana topik GESI dibicarakan dalam produksi pengetahuan dan penelitian di Indonesia dengan Kemenristekdikti sebagai salah satu pemangku kepentingan utama?

Pada Juni 2014, Knowledge Sector Initiative (KSI)<sup>2</sup> memfasilitasi perwakilan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti); Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI); dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) menghadiri simposium *“Science in Australia Gender Equity”* atau SAGE di Sydney, Australia. SAGE merupakan program kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesetaraan gender dan keberagaman dalam sains, teknologi, rekayasa, matematika, dan obat-obatan. Akademi Ilmu Pengetahuan Australia (Australian Academy of Science/AAS) menyanggupi kesepakatan forum SAGE untuk mendukung program evaluasi dan akreditasi kerangka kerja untuk isu kesetaraan gender di tiga puluh universitas, enam lembaga penelitian medis, dan empat organisasi ilmu pengetahuan pemerintah. Kemenristekdikti turut antusias untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mempertimbangkan proses internalisasi gender dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

Kemenristekdikti sebagai lembaga pemerintah yang memayungi beragam penelitian di tingkat nasional, memiliki peran penting dalam menengahkan topik

1 Department of Economic and Social Affairs. 2010. *Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context*. New York: United Nations Publication.

2 KSI adalah program pendanaan inti dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

strategis seperti GESI ke *civitas academica* Indonesia. Pengarusutamaan ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyebaran gagasan dan praktik berkeadilan gender secara nasional melalui produksi penelitian. Salah satunya dengan mengadopsi GESI dalam kebijakan tentang penelitian yang “melek gender” (*gender literacy*). Hanya, sejauh mana niat baik Kemenristekdikti ini sanggup terlaksana? Menghadirkan GESI bukanlah perkara mudah karena jumlah lembaga pendidikan tinggi dan *civitas academica* cukup banyak. Sebab itu, KSI bersama Sajogyo Institute mencoba merefleksikan situasi ini dengan membuat studi pelingkupan (*scoping study*) terhadap produksi penelitian hibah Kemenristekdikti periode 2013-2015.

Dalam studi ini, Sajogyo Institute bersama KSI mencoba menjawab pertanyaan: sejauh mana perspektif GESI tampil secara eksplisit (visibilitas) dalam siklus penelitian—sejak panduan penelitian, perencanaan penelitian, triangulasi, hingga analisis data—hibah Kemenristekdikti? Di sini, GESI tidak sekadar ditempatkan sebagai strategi pembangunan semata, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral di tengah produksi pengetahuan yang patriarkis. Selama ini, penelitian selalu dianggap sebagai sebuah pranata produksi pengetahuan yang berlangsung objektif, bebas nilai, dan ilmiah dalam menjelaskan realitas manusia. Hanya, di balik pandangan yang demikian, aktivitas penelitian justru menjauh dari tujuannya sebagai instrumen perubahan sosial lantaran meniadakan manusia dan tidak peka terhadap keragaman ras, etnis, jenis kelamin, dan kelas sosial (Smith, 2005: 242-274). Di sinilah GESI berperan memperkaya penelitian yang inklusif di tengah Indonesia yang penduduknya majemuk.

Harapannya, dengan merunut topik GESI dalam hibah penelitian Kemenristekdikti, studi ini bisa membuka ruang diskusi di antara pembuat kebijakan mengenai keadilan gender dan inklusi sosial. Dengan demikian, muncul rekomendasi yang dapat memastikan topik GESI ke dalam kebijakan penelitian Kemenristekdikti. Di antaranya, (1) melakukan tindakan afirmatif terhadap topik penelitian GESI dan peneliti perempuan; (2) menyiapkan pedoman penelitian yang lebih inklusif terhadap ilmu sosial-humaniora berperspektif GESI; (3) melangsungkan penelitian pilot yang kolaboratif; serta (4) menyelenggarakan lokakarya untuk meningkatkan

pemahaman terhadap metode penelitian berbasis GESI. Pada akhirnya, riset ini diharapkan dapat membantu dan mengajak Kemenristekdikti untuk mengulas hibah penelitian yang ada sehingga pelaksanaannya ke depan menjadi lebih baik, terutama dalam menanamkan perspektif GESI di dalam riset.

## B. Pertanyaan Kajian

Dari latar belakang di atas, pertanyaan utama yang diajukan:

1. Ruang penelitian seperti apa yang disediakan Kemenristekdikti bagi *civitas academica* pendidikan tinggi Indonesia?
2. Sejauh mana analisis gender disertakan sebagai prasyarat penelitian dalam *Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX* selama periode 2013-2015?
3. Sejauh mana topik GESI tampak secara eksplisit dalam laporan penelitian penerima hibah Kemenristekdikti periode 2013-2015?

## C. Tujuan Kajian

1. Menjelaskan ruang penelitian yang disediakan Kemenristekdikti pada 2013-2015 bagi perguruan tinggi di Indonesia.
2. Terpetakannya topik-topik GESI yang sudah ada selama periode 2013-2015.
3. Rekomendasi taktis untuk Kemenristekdikti terkait dengan visibilitas topik GESI.

## D. Kerangka Pikir

Penelitian ini hendak melihat sejauh mana GESI digunakan dalam penelitian para penerima hibah Kemenristekdikti periode 2013-2015. Salah satu unit analisis GESI adalah analisis gender sebagai pandangan kritis dalam melihat hubungan kuasa laki-laki dan perempuan. Sebab itu, tim kajian menganggap penting untuk menjelaskan definisi gender dan analisis gender sebagai pijakan utama.

Gender adalah istilah dalam ilmu sosial yang merujuk pada karakteristik sosial terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karakteristik yang dimaksud bukan pada aspek jenis kelamin biologis, melainkan pada peran dan fungsi yang diciptakan manusia dalam proses menjadi laki-laki dan perempuan. Salah satu elemen yang mengonstruksikan gender adalah pengetahuan yang membedakan pengertian jenis kelamin biologis dengan pengertian jenis kelamin sosial. Jenis kelamin biologis merujuk pada pembeda biologis fungsi-fungsi alamiah dari alat kelamin perempuan dan laki-laki. Adapun jenis kelamin sosial adalah pembeda kultural dan sosial atas perbedaan jenis kelamin biologis yang dikonstruksi manusia. Salah satunya adalah anggapan bahwa perempuan lembut sedangkan laki-laki kasar.

Sebagai bagian dari pembentuk masyarakat, ilmu pengetahuan dan proses sosialisasinya memiliki peran besar dalam membangun konstruksi nilai, keyakinan, pembiasaan, dan asumsi-asumsi yang mendasari hubungan laki-laki dan perempuan. Sering kali, konstruksi ini menghasilkan sistem dan struktur yang tidak berkeadilan gender. Ketidakadilan gender menjadi sistem yang melahirkan ketimpangan multidimensi—ras, etnis, generasi, dan kelas sosial—dalam mengakses sumber daya dan menentukan hajat hidup. Ketidakadilan gender secara umum termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan (Fakih, 2012), yakni: (1) marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi); (2) subordinasi (meletakkan status seseorang lebih rendah dari yang lain berdasarkan asumsi gender); (3) pembentukan stereotip (pelabelan negatif yang berangkat dari prasangka gender); (4) kekerasan berbasis gender; (5) beban kerja lebih panjang dan banyak. Kelima bentuk ketidakadilan gender ini merupakan basis perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

### E. Riset sebagai Produksi Pengetahuan dengan Penggunaan Analisis Gender

Kajian dan penelitian dengan menggunakan analisis gender berkembang dalam ilmu sosial-humaniora. Namun sepanjang terkait dengan kelangsungan hidup manusia, analisis gender pun tetap penting dalam ilmu pengetahuan alam. Menurut August Comte (Hardiman, 2004), perkembangan ilmu pengetahuan sosial-humaniora banyak dipengaruhi oleh asumsi-

asumsi ilmu pengetahuan alam, seperti cara pandang positivistik. Dalam cara pandang ini kebenaran harus bersifat objektif, bebas nilai, pasti, positif, dan terukur. Sebab itu, syarat penelitiannya pun harus “objektif”. Peneliti harus berjarak, terukur, dan netral/tidak memihak. Di sini, gejala alam diandaikan sama rumusnya dengan gejala sosial budaya (Ahimsa-Putra, 2008). Asumsi ini justru banyak dikritik karena hanya mengeneralisasi gejala sosial budaya dan meniadakan pengalaman keterpinggiran, diskriminasi, dan penindasan perempuan di ranah domestik dan publik. Jika produksi pengetahuan didominasi oleh cara pandang positivistik, orang yang dilemahkan oleh praktik ketidakadilan gender tidak akan terlihat pada penelitian-penelitian positivistik. Padahal, pengalaman laki-laki, perempuan, kelompok miskin, dan difabel berbeda dari pengalaman orang kebanyakan yang cenderung dianggap serupa oleh positivistik. Pengalaman hidup inilah yang seharusnya dihadirkan dalam setiap produksi pengetahuan seperti penelitian.

Lemahnya cara pandang positivistik dalam menjelaskan realitas sosial yang timpang menghadirkan sejumlah teori kritis, salah satunya analisis gender. Bahkan analisis gender bisa memperluas bingkai cakupan atau kedalaman lingkup penelitian daripada menggunakan pendekatan positivistik semata. Bayangkan, dalam penelitian dengan pendekatan positivistik, peneliti harus mengikuti postulat bahwa penelitian harus dapat membebaskan diri dari hubungan hierarkis dan timbal-balik antara subjek dan objek penelitian. Postulat serupa itu dibangun demi membentuk standar objektivitas dalam dunia akademik. Pada kenyataannya, prinsip metodologis tersebut tak sanggup mengeksplorasi hubungan subjek dan objek (*hidden* dan *invisible*) meskipun hal itu ada dan nyata.

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki pengalaman dan pengetahuan berbeda. Keragaman inilah yang tidak mampu diakomodasi pendekatan positivistik yang bersandar pada data-data kuantitatif sehingga sulit menggambarkan ragam pengalaman tersebut. Misalnya, bagaimana mengukur rasa sakit secara objektif dalam pendekatan positivistik? Apakah diukur dari seberapa sering mengaduh, berobat, atau berkunjung ke dokter? Meskipun rasa sakit itu empiris, “rasa” memiliki dimensi yang luas dan dalam terkait dengan gender, kelas, hingga nilai kepantasan. Dengan

pisau analisis gender, rasa tersebut bisa lebih digali daripada dengan pendekatan statistik. Tugas ilmu sosial-lah mengungkap persoalan ini. Sebab itu, penting untuk mengembangkan instrumen dan metode yang mampu menampilkan pengalaman perempuan dan kelompok sosial marginal lainnya, agar pengalaman tersebut tidak sekadar dibunyikan melalui angka-angka statistik semata.

Penelitian dengan menggunakan analisis gender merupakan bagian dari filsafat kritis untuk mengisi kekosongan paradigmatik dalam ilmu sosial-humaniora. Di sini, peneliti memosisikan perempuan sebagai subjek atas pengalaman dan pengetahuannya, serta melihat secara kritis sistem nilai dalam relasi yang patriarkis.

Penggunaan metode penelitian yang berkeadilan gender sangat berguna bagi pembangunan. Misalnya, untuk memastikan manfaat pembangunan melalui penggalian terhadap akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi mereka. Analisis gender membantu menggali jawaban atas pertanyaan: mengapa perempuan berpartisipasi dan siapa yang memutuskan? Penelitian yang berkeadilan gender juga memungkinkan peneliti keluar dari prasangka yang bias gender dalam kerangka dan instrumen penelitiannya. Hal yang juga penting, penelitian mampu mengkritisi penindasan antargender sebagaimana kritik atas penindasan relasi kuasa antarkelas sosial. Sehingga muaranya adalah adanya kerangka yang jelas bahwa penelitian itu tak berhenti pada analisis tanpa aksi perubahan.

Penelitian dengan pendekatan yang berkeadilan gender ini bertujuan memberikan kesadaran kritis bagi mereka yang termarginalkan. Harapannya, penelitian ini sanggup menggambarkan hubungan baru yang lebih adil bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok marginal lain seperti difabel. Hal tersebut bisa dicapai selagi ada kepekaan terhadap pembeda-pembeda kuasa berbasis gender dan sepanjang menggunakan teori yang menggunakan analisis gender (Rinharz, 2006).

Produksi pengetahuan berpengaruh besar dalam mengonstruksikan gender laki-laki dan perempuan. Semula orang menganggap bahwa pengetahuan bersifat netral dan adil, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada kenyataannya, pengetahuan sering kali bias dan subjektif menurut gender sehingga

berbeda dampaknya bagi laki-laki dan perempuan.

Para perancang pembangunan melihat bahwa pembangunan ternyata memberi dampak berbeda menurut gender. Sebab itu, mereka berupaya melibatkan perempuan ke dalam proses-proses pembangunan. Dari aspek produksi pengetahuan, pelibatan itu tak terbatas pada keikutsertaan perempuan dalam proses produksi pengetahuan seperti riset, tetapi juga dalam perspektif serta metodologi dalam menggali pengetahuan itu sendiri agar adil gender.

Secara metodologis, upaya pelibatan perempuan dalam riset produksi pengetahuan diawali dengan memastikan mereka terlibat dalam proses pembangunan. Generasi pertama pelibatan perempuan dalam proses produksi pengetahuan dicakup dalam ideologi "*women in development*" atau WID. Gagasan WID yang muncul pertama kali pada 1970-an itu mendasarkan asumsinya pada pelibatan perempuan dalam pembangunan guna meningkatkan pendapatan/ekonomi. Melalui sejumlah riset dengan metodologi terbaru yang bisa membaca relasi gender dalam setiap subjek penelitian, pendekatan WID dikoreksi lagi karena mengabaikan ragam kebutuhan perempuan yang tak melulu pada peningkatan ekonomi dan partisipasi di ruang publik. Tanpa adanya keadilan di ranah personal, partisipasi perempuan malah memunculkan persoalan lain berupa beban berlipat ganda, yang berujung pada proses pemiskinan.

Atas dasar pengalaman itu, pendekatan dan ideologi gender dirumuskan guna memastikan terpenuhinya rasa keadilan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak politik perempuan dalam pengambilan keputusan. Ini dilakukan melalui partisipasi mereka dalam produksi pengetahuan dengan menawarkan metode penggalian pengetahuan yang sensitif terhadap pengalaman perempuan. Perubahan cara pandang ini berpengaruh besar dalam dunia riset sosial, ekonomi, dan sains, dengan elemen gender dipertimbangkan dalam desain dan metodologi riset. Pendekatan kedua ini biasa disebut "*gender and development*" atau GAD. Pendekatan ini mengakomodasi model-model penggalian pengetahuan seperti etnografi, sejarah perempuan, suara perempuan, pengalaman perempuan, serta model-model pengungkapan dan penulisan yang sensitif pada keragaman gender.

Studi pelingkupan ini dilakukan melalui dua pendekatan tersebut, WID dan GAD. Sejauh mana riset Kemenristekdikti yang diteliti mengoperasikan pendekatan yang menggunakan pelibatan perempuan (WID), atau riset yang secara substantif menganalisis faktor-faktor relasi kuasa gender sebagai variabel penelitiannya. Maka, dalam diskusi mengenai persoalan gender dalam produksi pengetahuan, prinsip-prinsip berikut penting untuk diperhatikan:

- (1) Kelompok perempuan sebagai subjek penelitian, baik di perdesaan maupun di perkotaan, adalah bagian dari lapisan kelompok sosial. Artinya, dalam menjelaskan masalah ini kelompok perempuan mesti dilihat dalam struktur sosial yang tidak seragam.
- (2) Perempuan bukan entitas tunggal (*monoface*), melainkan majemuk (*multiface*), yang memiliki diferensiasi dan kelas sosial yang tidak selalu sama dalam gender dan kelasnya.
- (3) Tujuan-tujuan untuk mewujudkan perubahan berkeadilan gender harus diletakkan dalam kerangka produksi pengetahuan, yang pada dasarnya ternyata tidak netral gender.
- (4) "Keadilan gender" dalam produksi pengetahuan harus menghormati dan berdasarkan nilai-nilai dan budaya lokal.

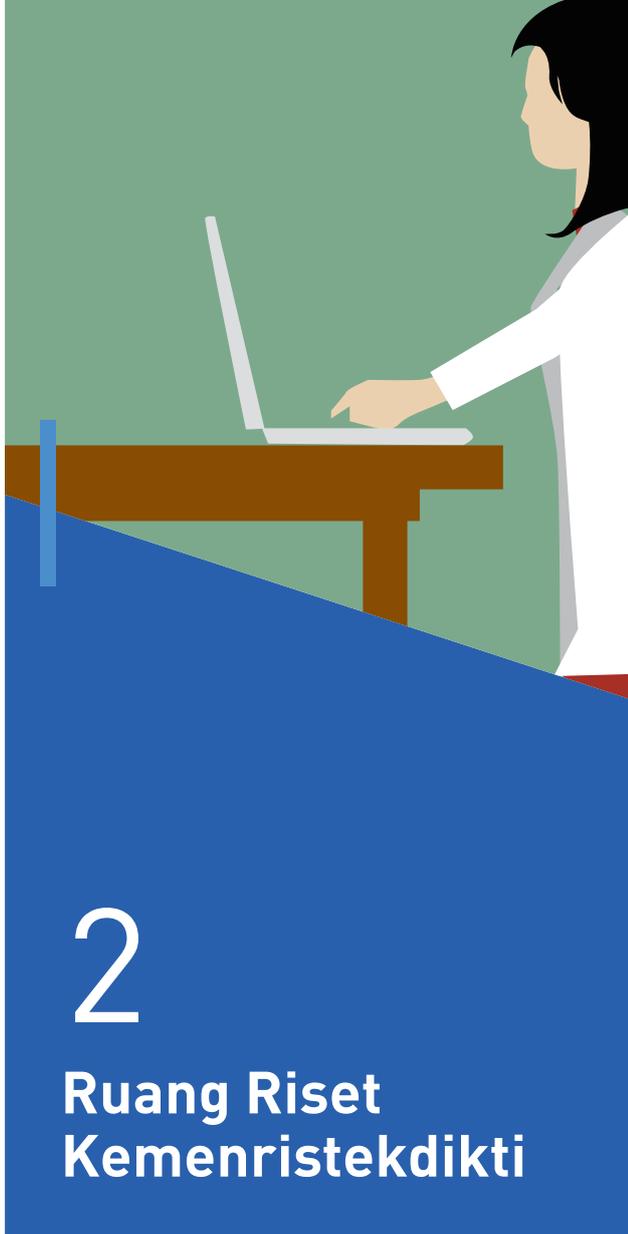
- (5) Ilmu pengetahuan harus menyadari bahwa perempuan memiliki karakteristik sosial yang dinamis (*social construction*), bukan statis (*given*).
- (6) Persoalan gender yang digugat melalui proses produksi pengetahuan adalah aspek gender yang tidak ditimbang dalam premis-premis pengetahuan karena berangkat dari cara pandang yang bias, naif, atau bahkan diskriminatif sejak awal.
- (7) Persoalan ketidakadilan gender harus dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dalam produksi pengetahuan sebagaimana stereotip yang berangkat dari perbedaan-perbedaan lain, seperti keadaan fisik, perbedaan etnis, suku, ras, dan elemen entitas sosial lainnya.
- (8) Ilmu pengetahuan pada dasarnya harus sanggup mengatasi kesenjangan dan praktik diskriminasi berbasis GESI.

Dengan pertimbangan di atas, maka GESI bukan hanya terbatas dalam ruang lingkup pemenuhan hak dasar sebagai prasyarat keadilan gender di wilayah "sipol",<sup>3</sup> tapi juga merupakan penegasan keadilan sosial dalam dimensi "ekosob".<sup>4</sup> Juga, keadilan terhadap akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol atas pembangunan yang berangkat dari produksi pengetahuan yang berkeadilan gender.

---

3 Hak sipil dan politik: hak individu yang hanya dapat dinikmati apabila negara bersikap pasif dan tidak melakukan intervensi terhadap individu.

4 Hak ekonomi, sosial, dan budaya: hak individu sebagai anggota masyarakat (sosial dan komunal) yang hanya terpenuhi apabila negara bersikap aktif dalam mengatur dan menjamin kesejahteraan masyarakat.



## 2

# Ruang Riset Kemenristekdikti

### A. Kata Kunci dalam “Buku Panduan IX”

Setiap satu sampai tiga tahun, Kemenristekdikti diamanati undang-undang untuk menerbitkan buku panduan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen perguruan tinggi. Melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ditlitabmas), Kementerian menyusun buku panduan guna mengakomodasi peningkatan anggaran sebesar 30 persen dari dana bantuan operasional fungsi pendidikan untuk kegiatan penelitian.<sup>5</sup> Buku panduan tersebut sangat strategis untuk menentukan tujuan, metode, hingga kegiatan penelitian pendidikan tinggi yang diajukan dalam skema hibah. Di dalamnya terdapat

kategorisasi skema penelitian dan tata aturan tiap skema, hingga penentuan bobot penilaian proposalnya.

Menurut Kepala Subdirektorat Penelitian Ditlitabmas Desmelita, isi buku panduan tersebut sudah terang sehingga para dosen tinggal mengikuti penjelasannya. “Kami sudah memberi panduan ke semua dosen, harusnya mereka menyesuaikan diri (dengan buku panduan),” katanya.

Bila posisi buku panduan itu begitu strategis, pertanyaannya: ruang riset seperti apa yang disediakan pemerintah bagi para dosen? Pertanyaan ini untuk menunjukkan gagasan mengenai ruang riset yang disediakan Kemenristekdikti guna mengakomodasi penelitian pendidikan tinggi. Penelitian apa dan seperti apa? Masalah apa yang ingin dijawab?

Sebab itu, langkah pertama dari riset ini adalah melakukan kajian (*review*) terhadap *Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX* yang diimbangi dengan telaah atas teks berita tentang kebijakan Kemenristekdikti. Dalam mengkaji, tim studi memilih kata-kata kunci yang berulang kali ditulis dan dianggap penting. Prosesnya dilakukan dengan menunjukkan intensitas kemunculan kata kunci tertentu dalam naskah buku panduan dan kedekatan antarkata kunci berbanding dengan urutan intensitas kata. Karena studi ini hendak melihat sejauh mana kebijakan membuka ruang bagi studi gender, kata kunci yang terkait dengan isu gender menjadi bahan pertimbangan.

Kajian terdiri dari empat bagian sesuai pembabakan dalam *Buku Panduan Edisi IX. Pertama*, kajian atas pengantar dan pendahuluan yang ditulis pejabat Kemenristekdikti. *Kedua*, kajian terhadap skema hibah penelitian desentralisasi yang terdiri dari tujuh skema. *Ketiga*, kajian mengenai skema hibah penelitian kompetisi nasional yang terdiri dari enam skema. *Keempat*, kajian atas skema hibah pengabdian masyarakat yang terdiri dari tujuh skema. Dengan pembagian ini, kajian dapat menunjukkan kata-kata kunci yang penting dan substansial mengenai ruang riset Kemenristekdikti.

5 Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526e89a610164/kendala-dana--perguruan-tinggi-minim-penelitian>, diakses pada 12 April 2017, pukul 11.06.

Pada kajian pertama, bagian pengantar dan pendahuluan, ditemukan delapan kata atau frasa kunci yang memberi arahan penelitian pendidikan tinggi di Kemenristekdikti. Kedelapan kata kunci tersebut adalah “penelitian mendukung prioritas nasional”, “kompetisi”, “komparasi”, “inovasi teknologi”, “dampak positif pembangunan”, “komersialisasi”, “alih teknologi ke masyarakat”, dan “memenuhi kebutuhan masyarakat tersisih”. Dari delapan kata kunci tersebut, sebagian besar menunjukkan bahwa penelitian harus memberi “dampak positif pada pembangunan”. Proposisi ini diulang lima kali pada bagian pengantar. Sedangkan proposisi penelitian sebagai “inovasi teknologi” atau “temuan ilmiah yang dapat diandalkan” diulang tiga kali. Dengan demikian, “inovasi teknologi” dan “pembangunan” menjadi proposisi yang dianggap penting dan diperhatikan pemerintah dalam penyelenggaraan penelitian pendidikan tinggi di Indonesia.

Kendati demikian, dalam bab pengantar dan pendahuluan itu, tak ada kata kunci yang secara spesifik menyebut isu-isu yang tercakup dalam GESI sebagai bagian dari prioritas nasional atau prasyarat kompetensi. Begitu juga tak terdapat istilah-istilah kunci yang terkait dengan isu GESI secara spesifik maupun umum sebagai agenda penelitian yang perlu didorong dalam inovasi teknologi dan temuan ilmiah, yang dapat diandalkan guna menyukseskan pembangunan. Padahal, pendasaran semacam ini penting sebagai prinsip dasar adanya niat baik dari pemerintah yang secara normatif dan substansial tertuang dalam dokumen resmi.

Kajian kedua dilakukan atas tujuh skema penelitian dalam hibah penelitian desentralisasi. Ketujuh skema tersebut meliputi “Unggulan Perguruan Tinggi”, “Hibah Bersaing”, “Fundamental”, “Tim Pascasarjana”, “Kerja Sama Antar-Perguruan Tinggi”, “Disertasi Doktor”, dan “Dosen Pemula”. Menurut Desmalita, Kepala Subdirektorat Penelitian Ditlitabmas, skema desentralisasi dalam penyelenggaraan seleksi proposal bisa dimaknai sebagai tindakan afirmatif terhadap perguruan tinggi, yang dianggap Kemenristekdikti sebagai binaan.

*“Bila semua (seleksi) ada di nasional, banyak proposal masuk berguguran. Ada UGM dan perguruan tinggi besar... dengan perguruan tinggi di daerah kan beda nilainya. Jadi 70 persen dana (di Buku Panduan Edisi IX tertulis 60 persen dari total dana [lihat hal. 29]) harus desentralisasi.”* Desmalita, Kepala Subdirektorat Penelitian Ditlitabmas

Dilihat dari kebijakan tersebut, alokasi dana bagi skema hibah penelitian terdesentralisasi sesungguhnya tergantung pada kinerja penelitian perguruan tinggi, partisipasi dosen, dan rencana induk penelitian yang menunjukkan keunggulan universitas. Lantaran seleksi proposal penelitiannya lebih otonom, bangunan skema risetnya perlu dicermati lebih mendalam.

Skema tersebut tergambar dari kata-kata kunci yang kerap muncul dalam penjelasan skema dan metode seperti yang tertulis dalam buku panduan. Sebab, meski disebut desentralisasi, kewenangan universitas terbatas pada penyusunan rencana induk penelitian sesuai keunggulan masing-masing kampus, basis data, dan pelaporan penggunaan dana (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013: 14). Adapun pembuatan rancangan skema penelitian berikut tata aturannya dilakukan oleh Kemenristekdikti. Maka, setelah membaca secara detail setiap skema dalam *Buku Panduan Edisi IX*, studi pelingkupan ini relevan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan masing-masing skema, terdapat proposisi dominan bahwa penelitian diharuskan memiliki *output* atau keluaran berupa “rekayasa sosial” (disebut sebanyak 28 kali). Proposisi ini selalu diulang dalam semua skema penelitian dan menjadi ukuran penilaian terhadap kinerja penelitian. Meski proposisi ini dianggap penting, tapi buku panduan tidak memberikan definisi yang jelas tentang “rekayasa sosial”. Istilah ini baru keluar dalam “Formulir Evaluasi dan Luaran Kegiatan” (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013: 387-389) sebagai indikator evaluasi untuk mengecek kebijakan publik yang sedang atau sudah diubah oleh peneliti. Sebagai penerima hibah, pada posisi ini peneliti harus melangsungkan penelitiannya untuk “bersinergi dengan kebijakan pemerintah” atau setidaknya “bekerja sama dengan lembaga pemerintah” (proposisi ini disebut 11 kali). Sebab,

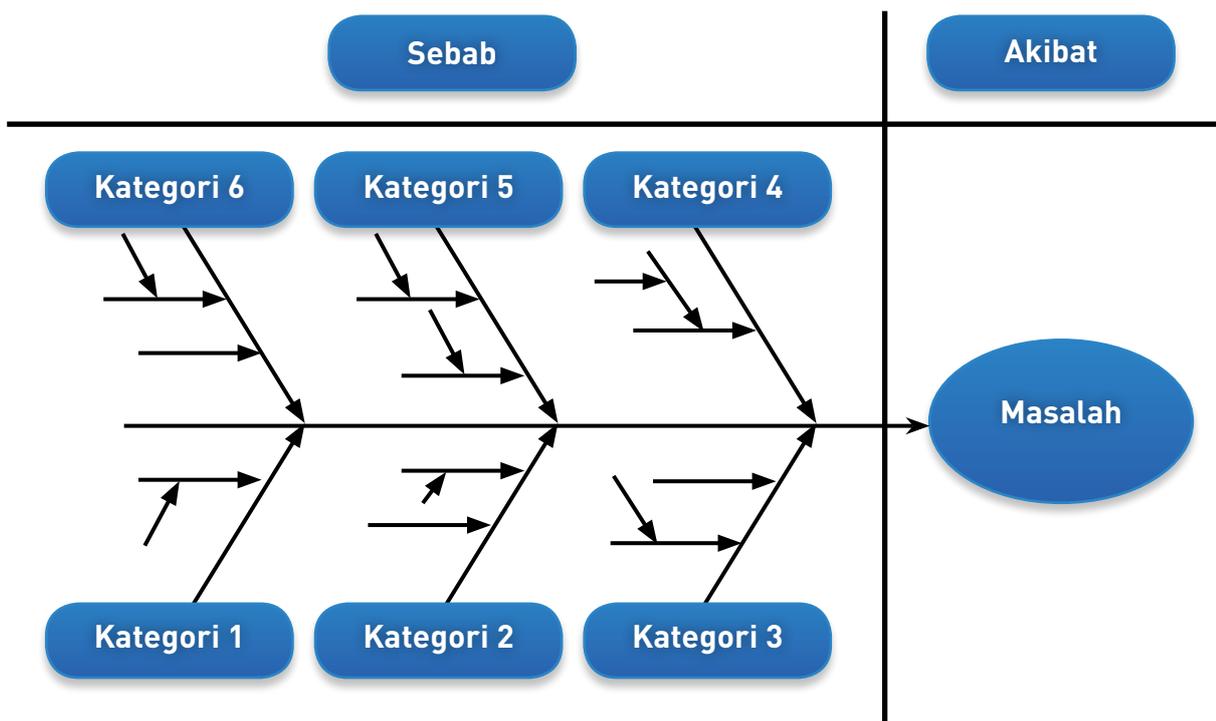
maksud dari “rekayasa sosial” tidak bisa dijauhkan dari nilai penelitian sebagai pendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013: 23).

Ihwal konsep rekayasa sosial, studi ini melihat bahwa upaya ke arah perubahan sosial telah digunakan sebagai indikator rekayasa sosial yang dikehendaki. Namun tidak ada kata kunci yang terkait dengan rekayasa sosial, yang menunjuk pada perbaikan relasi gender sebagai indikator perubahan sosial— yang menjadi salah satu prasyarat dalam mengecek kebijakan publik yang sedang atau sudah diupayakan oleh peneliti melalui risetnya. Di samping rekayasa sosial, skema hibah terdesentralisasi mengharapkan penelitian bertujuan mendukung pemanfaatan “teknologi tepat guna” bagi masyarakat yang produktif secara ekonomi (proposisi ini disebut 22 kali). Dengan demikian, penelitian hibah perlu menghasilkan invensi teknologi (proposisi ini disebut 13 kali ) dan prototipenya (proposisi ini disebut 20 kali ). Misalnya, dalam *Buku Panduan Edisi IX* disebutkan bahwa, “Penelitian Hibah Bersaing harus berorientasi pada produk yang memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat... dan bisa berbentuk kajian yang nampak tak berwujud (*intangibile*) seperti kebijakan.”

Namun demikian, skema hibah untuk menghasilkan teknologi tepat guna dalam dokumen itu tak memperlihatkan analisis yang mengungkapkan bahwa “teknologi tepat guna” yang dimaksud bukanlah produk atau rekayasa yang netral gender, apalagi buta gender. Pemanfaatan teknologi tepat guna semestinya disertai upaya yang jelas dan nyata dalam meringankan beban kerja perempuan, sebagaimana mempermudah pekerjaan orang dengan disabilitas. Sebab itu, guna mencapai tujuan penelitian dalam hal mendukung pemanfaatan teknologi tepat guna, semestinya ada bukti terang yang menunjukkan pemanfaatan teknologi yang sensitif dan adil gender.

Lantaran sifatnya yang praktis dengan keluaran jelas, proposisi ini harus diimbangi dengan upaya Kemenristekdikti untuk mewajibkan peneliti mengupayakan secara sungguh-sungguh bagaimana teknologi tepat guna bisa mengatasi kesenjangan sosial, gender, keadaan fisik, dan yang disebabkan perbedaan diskriminatif lainnya. Selain itu, mereka diwajibkan untuk memublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi (proposisi ini disebut 22 kali ). Sehingga, hasil penelitian dari hibah terdesentralisasi bisa memiliki “hak kekayaan intelektual” (proposisi ini disebut 21 kali) serta mengatasi kesenjangan dan praktik diskriminatif.

**Gambar 1. Identifikasi Sebab-Akibat Masalah**



Selain melihat proposisi penting dalam skema penelitian, studi ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan oleh peneliti penerima hibah. Di sini, konsep penelitian ditujukan bagi penelitian terapan yang “memiliki dampak ekonomi strategis” (hal. 49) dan “menghasilkan inovasi teknologi iptek-sosbud” (hal. 61). Pada setiap skema penelitian terdesentralisasi, penting untuk menuliskan metode sebagai kerangka logis yang berisi keluaran, tahapan capaian, dan indikator capaian. Metode penelitian sebagai kerangka logis inilah yang kemudian disebut Kemenristekdikti dalam *Buku Panduan Edisi IX* sebagai “diagram ikan”—karena bentuknya seperti ikan. Melalui konsep “diagram ikan”, peneliti diharapkan bisa menjelaskan keluaran penelitian yang mendukung pembangunan. Urutan metode “diagram ikan” tertera dalam **Gambar 1**.

Diagram cara membaca persoalan tersebut dikembangkan sarjana Jepang, Dr. Kouru Ishikawa, pada periode 1960-an. Cara membacanya juga dikenal sebagai upaya mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari suatu masalah. Dari bentuk diagram yang mirip tulang ikan, Scarvada dalam Asmoko (2004) menyebut bahwa diagram ini cocok dipakai untuk mengidentifikasi sumber penyebab dari masalah tertentu dan solusi dalam tataran manajerial.

Bila hibah desentralisasi memiliki standardisasi keluaran penelitian beserta metodenya, hal sama juga berlaku bagi skema hibah penelitian kompetitif nasional, yang memiliki enam skema turunan, yaitu “Unggulan Strategis Nasional”, “Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri”, “Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional”, “Penelitian Kompetensi”, “Penelitian Strategis Nasional”, dan “Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Berbeda dengan skema desentralisasi, skema kedua ini cenderung mendorong peneliti dari beragam latar belakang universitas untuk berkompetisi di arena yang sama. Sesuai namanya, hibah penelitian ini dikompertisikan di tingkat nasional dan ditujukan untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah. Namun karena arenanya sama, “Yang berkompetisi dari seluruh Indonesia. Tapi yang paling sering dapat, ya cuma ITB, IPB, UGM, UI,” kata Kepala Subdirektorat Penelitian Ditlitabmas Desmelita.

Dari sisi keadilan sosial dan gender, tindakan afirmatif (*affirmative action*) tetap penting dilakukan tanpa mengurangi kualitas penelitian. Caranya, harus ada klasterisasi berdasarkan “kelas” mutu perguruan tinggi. “Kelas” unggulan seperti ITB, IPB, UGM, dan UI harus berkompetisi dengan sesamanya, sebab mereka sudah melangkah lebih dahulu dan memiliki sumber daya lebih banyak. Sementara pada klaster kedua atau ketiga hibah dikompertisikan dengan kriteria yang jelas. Misalnya, berdasarkan jumlah dosen, mahasiswa, tenaga peneliti, dan seterusnya. Jika ternyata pada klaster kedua dan ketiga mutu penelitian kurang memadai, Kemenristekdikti harus melakukan upaya afirmatif berupa pendampingan dan penguatan kapasitas dosen dalam penyusunan rancangan penelitian sebelum mereka mengikuti kompetisi.

Model tindakan afirmatif ini pun berlaku untuk peneliti perempuan. Jika ternyata hambatannya ada pada kualitas penulisan proposal, kapasitas mereka harus ditingkatkan dengan memberi pendampingan saat penyusunan proposal. Jika hambatan yang muncul disebabkan peran tradisional gender di keluarga (misalnya memiliki anak kecil atau tak mendapatkan izin dari keluarga), Kemenristekdikti harus mengatasi kesenjangan tersebut dengan membuat regulasi, menambah dana untuk pendamping peneliti perempuan yang membawa anak berumur di bawah satu tahun (masih menyusui), atau dengan cara lain yang mendukung peneliti perempuan dapat melakukan riset tanpa mengurangi mutu penelitiannya.

Dalam skema kedua, penelitian harus bersifat “pengembangan yang diperuntukkan bagi penelitian terapan” (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013: 193). Di balik “peruntukkan” tersebut, ada anggapan bahwa karakter penelitian terapan lebih mudah disinergikan dengan agenda pembangunan pemerintah. Adapun tujuan pembangunan mengarah pada “proses industrialisasi yang diasumsikan mampu meningkatkan kesejahteraan, keadilan, serta kebanggaan bagi bangsa Indonesia” (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013: 111). Dalam prosesnya, nilai ini diterjemahkan menjadi pelibatan mitra industri untuk bekerja sama dalam memanfaatkan dan memasarkan produk penelitian universitas. Hal tersebut cukup gamblang digambarkan melalui proposisi-proposisi yang diperoleh dari pembacaan terhadap *Buku Panduan Edisi IX*.

Namun demikian, perlu ada penjelasan bahwa proses industrialisasi yang disebut mampu meningkatkan kesejahteraan itu harus mewaspadai kemungkinan terjadinya penyingkiran perempuan akibat proses industrialisasi yang bias gender. Sebab, terbukti pada sektor-sektor yang mengalami proses industrialisasi seperti pertanian dan perkebunan yang semula menyerap tenaga kerja perempuan, terjadi penyingkiran perempuan yang menyebabkan munculnya “feminisasi kemiskinan”—kemiskinan yang terjadi pada perempuan.

Dalam skema kedua, ada upaya untuk memosisikan penelitian sebagai pemberi “dampak positif terhadap pembangunan atau koridor ekonomi” yang telah ditetapkan pemerintah (proposisi ini disebut 28 kali). Dampak positif tersebut hanya bisa terjadi bila proposal penelitian yang dikompetisikan menuruti sektor prioritas nasional dan sektor produksi industrial strategis nasional (proposisi ini disebut 25 kali). Di sektor nasional inilah, dua belas “permasalahan bangsa dan masyarakat” diidentifikasi oleh pemerintah, mulai dari pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, ketahanan dan keamanan pangan, hingga pembangunan manusia dan daya saing bangsa (lihat detailnya pada *Buku Panduan Edisi IX*, 2013: 193).

Berdasarkan tema di atas, setiap penelitian diharapkan bisa menawarkan solusi praktis dari masalah bangsa dengan menjalin sinergi dan kerja sama antara universitas, industri, dan pemerintah. Misalnya, masalah kemiskinan bisa diatasi bila pemerintah bisa memfasilitasi akses modal dan teknologi tepat guna bagi mereka yang membutuhkan (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013: 199). Demikian pula dengan tema pengelolaan bencana yang bisa diatasi bila ada kombinasi antara teknologi lokal dan teknologi tepat guna agar mitigasi bencana berlangsung akurat. Ukuran-ukuran dari kedua proposisi di atas hanya bisa dilihat bila penelitian sanggup menghasilkan “teknologi tepat guna bagi masyarakat yang produktif secara ekonomi” (proposisi ini disebut 21 kali) dan “prototipe produknya” (proposisi ini disebut 19 kali). Seluruh proposisi tersebut sebenarnya bisa diikat oleh “permintaan tinggi dari pasar” terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna yang dihasilkan (proposisi ini disebut 19 kali). Dalam prosesnya, setiap teknologi tepat guna yang dihasilkan hanya bisa ditransaksikan bila ada pengakuan terhadap

“hak kekayaan intelektual” penemu atau peneliti (proposisi ini disebut 17 kali). Jadi, pemanfaatan massal bagi publik oleh industri hanya bisa dilakukan bila peneliti mengurus hak paten temuannya.

Kendati demikian, pada pembahasan bagian tersebut seluruh uraian sama sekali tidak membicarakan persoalan relasi antarmanusia sebagai subjek penelitian. Sebab itu, relasi gender tidak dijadikan indikator keberhasilan dalam mengusulkan solusi praktis guna menghadapi persoalan bangsa. Penggunaan istilah “masyarakat” cenderung generik, bermakna tunggal, dan homogen.

Sejumlah penelitian tentang pemiskinan perempuan membuktikan modal ternyata bukanlah satu-satunya elemen penting bagi mereka dalam mengembangkan usaha. Sebelum modal, bagi perempuan hal yang terpenting adalah akses dan kontrol mereka atas waktu, pengambilan keputusan, dan pengelolaan rumah tangga. Membesarnya modal dan keuntungan belum tentu berdampak langsung terhadap perempuan ketika pengambilan keputusan tak ada dalam genggaman mereka atau beban kerja domestik tak berkurang. Sebab itu, bantuan permodalan sebaiknya disalurkan jika kemandirian perempuan dalam berbicara dan mengambil keputusan telah tercapai. Elemen-elemen terkait pemberdayaan perempuan harus menjadi salah satu parameter dalam menentukan keunggulan penelitian pada bidang ekonomi dengan perspektif gender.

Lantaran skema penelitian yang diajukan berlangsung selama beberapa tahun, metode penelitian pada setiap pengajuan proposal mensyaratkan adanya peta jalan. Isinya, target waktu, hal yang sudah dilaksanakan, dan apa yang akan dikerjakan dalam beberapa tahun mendatang. Ihtwal target waktu, pada skema penelitian seperti “Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri” dan “Strategis Nasional” harus berorientasi pada pemenuhan hak kekayaan intelektual dan menghasilkan prototipe supaya strategi bisnis bisa dirancang dengan jelas oleh mitra industri.

Di samping mensyaratkan peta jalan, metode penelitian dimaknai sebagai bahasan terhadap teknik pengumpulan data, analisis terhadap data, dan tentu saja keluaran kegiatan tiap tahun serta indikator

capaian yang terukur. Keluaran per tahun dan indikator capaian dianggap penting lantaran penelitian dalam skema kompetisi nasional berlangsung selama dua tahun. Ukuran-ukuran ini penting diperhatikan lantaran seluruh skema hibah dinilai dengan orientasi terapan, keluaran penelitian yang dihasilkan, kesiapan fasilitas penelitian, dan mitra yang berkomitmen untuk memanfaatkannya dalam industri. Dengan demikian, industrialisasi dianggap bebas nilai karena tujuannya dianggap mulia, yakni inovasi penelitian didasarkan pada pemanfaatan potensi lokal, seperti bahan baku dan sumber daya manusia lokal, agar bisa tersambung ke industri nasional dan pemerintah.

Maka, gambaran peta jalan yang dituntut sebagai syarat pengajuan proposal menjadi penting. Sebab, melalui peta jalan ini siapa pun akan mengetahui bagaimana tahapan perencanaan dipikirkan sebagai target antara, sebelum sampai tujuan akhir. Namun, dalam buku panduan tak terdapat gambaran peta jalan yang menunjukkan perlunya analisis gender untuk menggambarkan bagaimana laki-laki dan perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, dan mengontrol sumber daya pembangunan serta memanfaatkannya.

Kedua skema tadi merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung darma penelitian melalui tindakan afirmatif terhadap universitas di daerah dan kompetisi tingkat nasional. Selain itu, Ditlitabmas mendorong skema hibah pengabdian masyarakat seperti tertulis dalam panduan. "... bidang pengabdian kepada masyarakat juga mendapatkan perhatian untuk dikembangkan... salah satu faktor... darma pendidikan tinggi di Indonesia" (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013: iii). Skema pengabdian ini terdiri dari tujuh subskema, yakni "Ipteks bagi Masyarakat", "Ipteks bagi Kewirausahaan", "Ipteks bagi Produk Ekspor", "Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus", "Ipteks bagi Wilayah", "Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR" , dan "Hibah Hi-Link". Nilai yang dibawa dalam skema ini relatif sama dengan skema sebelumnya, yakni sinergi bersama pasar, masyarakat, dan universitas.

Kesan terhadap sinergi tersebut muncul dalam proposisi-proposisi dominan yang ditemukan dalam mengkaji *Buku Panduan Edisi IX*. Proposisi dominan yang akan dibahas dalam naskah ini adalah "wirausaha dan atau manajemen usaha" (proposisi ini disebut 25

kali), "kemitraan dengan industri" (disebut 22 kali), "dampak positif terhadap pembangunan atau koridor ekonomi" (13 kali), dan "prototipe atau perencanaan bisnis" (13 kali).

Berdasarkan proposisi dominan tersebut, sinergi antara universitas, masyarakat, dan industri disambungkan dalam skema penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki aspek manajemen usaha dan kewirausahaan masyarakat. Pemerataan pembangunan, dalam penjelasan ketujuh skema, bisa tercapai melalui mekanisme pasar dengan penerima manfaat masyarakat yang produktif secara ekonomi bertemu dengan mitra industri. Kemitraan terbangun melalui perencanaan bisnis prototipe produk tertentu yang diperuntukkan bagi perkembangan perekonomian yang strategis. Proposisi dominan inilah yang mewarnai pembahasan skema hibah pengabdian masyarakat. Misalnya, dalam skema "Ipteks bagi Masyarakat", penerima manfaat hanyalah mereka yang produktif secara ekonomi, seperti pengusaha mikro atau mereka yang berkeinginan menjadi wirausaha. Para penerima manfaat ini dihubungkan dalam rantai komoditas tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri. "Misalnya pemasok bahan baku dan produsen yang memanfaatkan bahan baku tersebut menjadi produk" (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013: 233). Di sini, produktivitas ekonomi para penerima manfaat dan persoalan tata manajerial usaha menjadi prinsip penting yang mengendalikan seluruh skema pengabdian masyarakat.

Sesungguhnya, jika saja pendekatan WID diterapkan dalam skema kedua ini, yakni rumpun bidang pengabdian masyarakat, peluang untuk menghadirkan penelitian dan pengabdian yang sensitif GESI, terutama pada relasi gender dan kelompok disabilitas, sangat besar. Sebab, bidang pengabdian masyarakat pada praktiknya kerap menggerakkan perempuan sebagai penerima manfaat. Namun dalam dokumen panduan, isu relasi gender yang melandasi alasan bidang pengabdian masyarakat perlu menysar kaum perempuan, kaum difabel, dan kaum yang terpinggirkan lainnya, tidak dijelaskan.

Pemilihan tajuk setiap skema didasarkan pada kebutuhan ekonomi strategis negara yang berorientasi ekspor, dengan asumsi bisa meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan mitra industri. Salah satunya seperti "Ipteks Wirausaha" yang ditujukan bagi

peningkatan teknologi tepat guna bagi wirausaha kecil yang dikembangkan bersama mitra industri. Lantaran prinsip yang berlaku demikian, standar penilaian terhadap proposal penelitian pun tergantung pada kepuasan mitra wirausaha, baik masyarakat maupun industri, terhadap hasil penelitian. Hal yang sama juga terjadi pada penilaian skema penelitian kerja sama antara perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) dan pemerintah daerah yang diukur dengan dihasilkannya prototipe produk per tahun.

Pada bagian ini tim studi tidak menemukan penjelasan yang menitikberatkan perhatian pada perlunya pelibatan bukan hanya kelompok rentan dan kelompok miskin, tetapi juga kaum perempuan dan orang dengan disabilitas. Lantaran skema penelitian berorientasi pada aspek produksi dan manajemen usaha, metode yang dipilih pun tidak jauh dari itu. Hampir semua skema penelitian mensyaratkan adanya peta jalan penyempurnaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna atau rencana bisnis. Artinya, metode dalam proposal yang diharapkan, mengandaikan sebuah intervensi program selama dua sampai tiga tahun. Peta jalan setidaknya berisi rencana bisnis, bahan baku produksi, proses produksi, manajemen hingga pemasaran, serta kesesuaian rencana terhadap target pembangunan daerah. Kelemahan model penyusunan peta jalan seperti itu adalah penelitian hanya berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Sementara, bagi perempuan hal yang perlu ditekankan adalah kajian atas proses mereka dalam menjalankan usahanya, termasuk kendala nonekonomi yang berpengaruh pada usaha mereka. Pengamatan terhadap aspek ini seharusnya

disertakan dalam buku panduan. Dengan begitu, peta jalan yang diuraikan menunjukkan aspek relasi gender sebagai salah satu capaian keberhasilan produksi dan manajemen usaha.

Dari proposisi dominan di atas, tim studi mengurutkan tiga proposisi dominan pada tiga skema besar yang memayungi skema turunan hibah penelitian Kemenristekdikti.

Sebagaimana kajian bagian pengantar, kajian atas skema hibah penelitian desentralisasi dibagi ke dalam tujuh skema. Adapun kajian terhadap skema hibah penelitian kompetisi nasional terdiri dari enam skema dan kajian terhadap skema hibah pengabdian masyarakat terdiri dari tujuh skema. Dalam dua kajian yang disebut terakhir aspek GESI sama sekali tidak muncul sebagai salah satu elemen dalam instrumen penelitian, metode penelitian, hasil yang dicapai, hingga rekomendasi rekayasa sosial.

Berdasarkan proposisi dominan tadi, tim studi mencoba meraba ruang penelitian yang diharapkan oleh Kemenristekdikti. Juga, sejauh mana ruang penelitian tersebut memberikan peluang bagi tema gender dan inklusi sosial. Kategorisasi penelitian dalam skema hibah penelitian Kemenristekdikti merujuk pada asumsi riset sebagai modal terapan untuk perluasan bisnis dan pemerataan pembangunan. Karena diharuskan menjadi “terapan dalam sektor riil”, maka tak mengherankan bila riset-riset pendidikan tinggi selalu bersanding dengan kebutuhan pembangunan pemerintah yang didorong oleh kebutuhan pasar. Pembangunan tidak dilihat sebagai pelayanan terhadap ruang hidup khalayak,

**Tabel 1. Skema-skema Penelitian Kemenristekdikti 2013-2015**

Skema Hibah Desentralisasi Universitas	Skema Hibah Kompetisi Nasional	Skema Hibah Pengabdian Masyarakat
Rekayasa sosial	Dampak positif terhadap pembangunan/koridor ekonomi	Wirausaha dan manajemen usaha
Teknologi tepat guna masyarakat produktif ekonomi-usaha mikro/ <i>user oriented</i>	Berorientasi produk/prototipe/ <i>business plan</i>	Kemitraan dengan industri
Publikasi jurnal internasional/jurnal nasional terakreditasi	<i>Market-driven</i> /kebutuhan pasar/bermanfaat bagi pasar	Dampak positif terhadap pembangunan/koridor ekonomi

melainkan instrumen yang mendesak dan mendorong individu-individu agar masuk dalam kompetisi pasar.

## B. Menyoal Penelitian Terapan

Hibah penelitian berdasarkan sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari agenda pembangunan Orde Baru terhadap penelitian dasar (*basic research*) eksakta yang didanai Bank Dunia selama periode 1987-1990. “Baru pada 1991, penelitian dasar tidak hanya untuk eksakta, melainkan juga studi sosial-humaniora dengan harapan memiliki keluaran yang sama... bikin model rekayasa sosial atau simulasi hukum,” ujar Desmelita. Pada waktu itu, penelitian ditujukan untuk mendukung modernisasi teknologi yang menjadi target pembangunan.

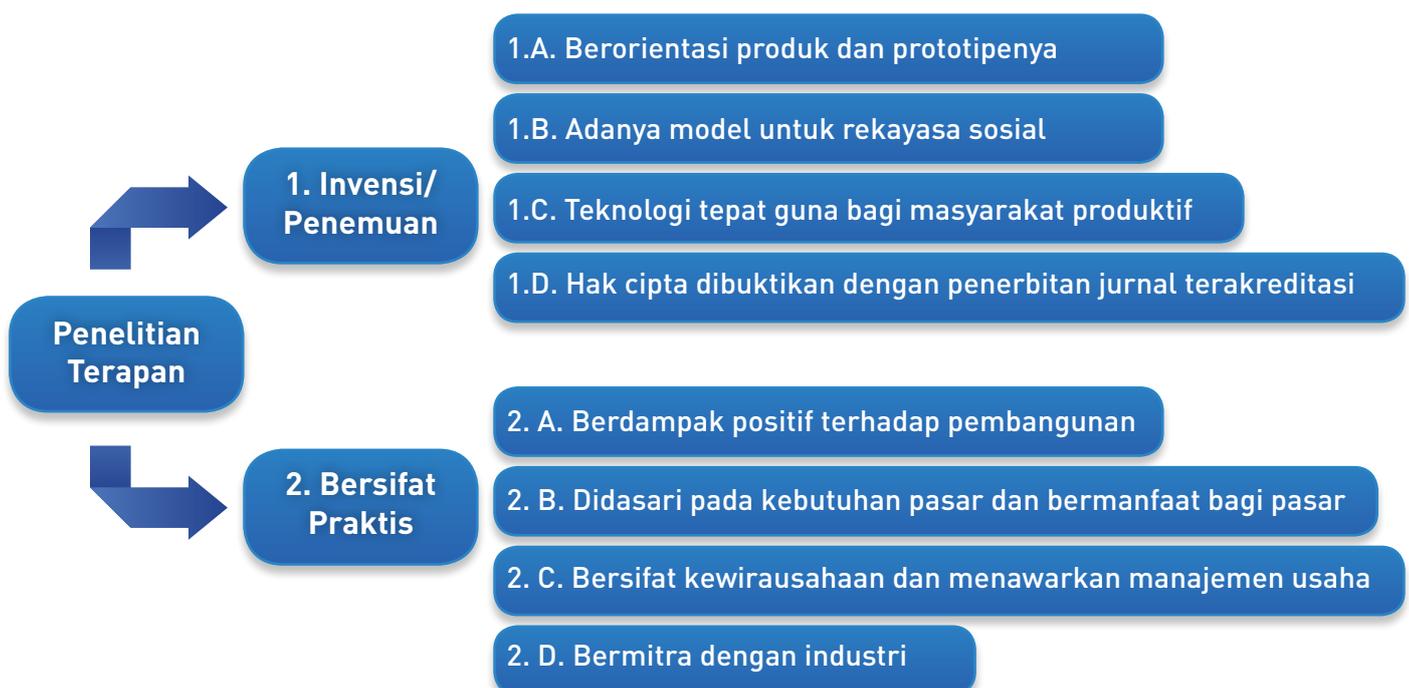
Tujuan penelitian yang mengabdikan pada pembangunanisme (*developmentalism*) dengan mendukung modernisasi teknologi menegaskan dominannya kebijakan yang cenderung abstrak gender. Watak pembangunanisasi telah terbukti kerap mengabaikan prinsip-prinsip GESI atau keadilan gender. Sebab, tujuan demi dan atas nama pertumbuhan ekonomi kerap cenderung diukur berdasarkan produktivitas yang serba efisien, cepat, dan materialistik. Demi meningkatkan keuntungan ekonomi, lahirlah ragam aturan dan regulasi baru

di banyak perusahaan dengan menyetatkan aturan-aturan internalnya yang mengabaikan hak-hak dasar buruh perempuan dan kelompok disabilitas. Ukuran kesejahteraan yang dihasilkan pembangunan berdasarkan pendapatan keluarga di perdesaan merupakan penilaian yang mengabaikan kontribusi alokasi waktu kerja perempuan, yang kadang bisa lebih besar nilainya jika dinominalkan secara ekonomi.

Nilai penelitian sebagai pendukung pembangunan mengakar kuat dalam tubuh pemerintah dan terejawantah saat menyelenggarakan hibah penelitian. Maka tak heran kata-kata kunci dalam *Buku Panduan Edisi IX* didominasi istilah-istilah turunan yang mendukung nilai tersebut. Tim studi mencoba memetakan pola yang muncul dan menguraikan kata kunci satu per satu.

Elaborasi ini merupakan kategorisasi dari kata kunci yang kuat dan memiliki kedekatan makna dengan kata kunci lain. Misalnya, makna “inovasi” (penemuan) demikian dominan karena dekat dengan “originalitas riset”, “riset untuk pasar”, dan “inovasi produk komoditas”. Kategorisasi ini sebaiknya diperkuat dengan wawancara dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) bersama Kemenristekdikti. Perbincangan dengan birokrat pendidikan tinggi yang seolah menganggap

Gambar 2. Pemetaan Kategorisasi Kata Kunci



wajar kata-kata kunci tadi akan memperkuat temuan bahwa orientasi riset di Kemenristekdikti adalah riset terapan (*applied research*). Usai melakukan kategorisasi, tim melengkapinya dengan bacaan penting mengenai definisi riset terapan, hubungan riset, dan pembangunan beserta kritiknya.

Semua kata kunci dominan yang muncul dalam beberapa bab di *Buku Panduan Edisi IX* menyinggung penelitian terapan. Penelitian ini dimaknai sebagai “kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” (*Buku Panduan Edisi IX*, 2013). Penggunaan kata “terapan” dilekatkan sebagai idiom yang menjembatani kegiatan penelitian dan implementasi praktisnya di masyarakat. Melalui penelitian terapan, para pengusul hibah dari perguruan tinggi diharapkan berperan sebagai peneliti sekaligus orang yang menerapkan program bagi kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana penelitian ini dilakukan? Kepada siapa penelitian ini didedikasikan?

Penyematan kata “terapan” merujuk pada pendekatan dalam penelitian yang secara sengaja dimaksudkan sebagai pemecahan masalah sosial laiknya seorang ahli ilmu alam membuah karya di laboratorium (Sajogyo, 1991: 34). Analogi ini menunjukkan bahwa kata “terapan” memiliki makna “asas kemanfaatan ilmu bagi banyak orang”. Di sini, para peneliti bertemu dengan pengambil kebijakan atau praktisi yang bekerja tidak semata-mata berdasarkan buku-buku teks. Sebab itu, sifat dasar penelitian terapan sebagaimana dirunut dari *Buku Panduan Edisi IX* adalah penelitian yang mampu menghasilkan penemuan dan penelitian yang bersifat praktis. Kedua sifat inilah yang memudahkan penelitian terhubung dengan skema pembangunan pemerintah seperti dituturkan oleh Deputi Tim Transisi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, sebagai berikut:

*“Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset adalah untuk memastikan adanya aplikasi ilmu. Selain itu, nanti soal arahan dana riset lebih jelas, diharapkan nanti lebih banyak pelaksanaan riset dasar, riset inovatif, dan riset teknologi yang berguna bagi masyarakat.”<sup>6</sup>*

6 Lihat <http://www.beritasatu.com/nasional/210248-alasan-jokowijk-memecah-kemdikbud.html>, diakses pada 09 April 2017.

Karena dimaksudkan sebagai penelitian yang bermanfaat langsung terhadap orang banyak, penelitian terapan dimaknai secara longgar dalam *Buku Panduan Edisi IX*. Pemaknaan pertama adalah penelitian harus menghasilkan invensi atau penemuan tertentu, yang bias ilmu pengetahuan alam alih-alih temuan. Di sini, penelitian harus menghasilkan prototipe sebuah produk penelitian yang memiliki hak cipta agar bisa dipertukarkan dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Di dalam ilmu sosial-humaniora dikenal sebuah asumsi bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang patuh terhadap hukum-hukum tertentu (Bryant, 1985). Sikap normatif ini sejalan dengan pengandaian bahwa penelitian harus menghasilkan produk regulasi atau hukum yang nantinya ditaati oleh masyarakat.

Penelitian yang berorientasi pada prototipe ini dekat dengan asas manfaat dari teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh suatu penelitian. Orientasi ini sejalan dengan dorongan Kemenristekdikti agar penelitian universitas yang selama ini dianggap “langitan” menjadi membumi. Bahkan, membumikan hasil penelitian berupa teknologi ini sama dengan tujuan hilirisasi komoditas dagang sebagaimana saduran awalnya dari bahasa bisnis. Dengan orientasi penelitian pada pengembangan teknologi, maka penemuan dianggap lebih berpeluang untuk masuk ke dalam industri, yakni dilirik investor dan bisa diproduksi secara massal. Asumsinya, bila diproduksi massal, penelitian tersebut bisa diakses oleh khalayak luas. Salah satu contohnya ialah teknologi terapi kanker menggunakan Electro Capacitive Cancer Treatment (ECCT) dan Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT).

*“Teknologi-teknologi tersebut sudah memikat sejumlah investor, antara lain dari Jepang dan Amerika Serikat.... Dengan demikian, inovasi tidak dimatikan, tetapi didampingi agar nanti bisa dilakukan hilirisasi dan komersialisasi.”<sup>7</sup>*  
Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir

Penegasan bahwa ukuran keberhasilan sebuah penelitian hanya pada pengembangan teknologi dan diakses oleh khalayak luas menunjukkan ketidakpekaan

7 Lihat <http://print.kompas.com/baca/ipitek/2015/12/11/Kebutuhan-Industri-Bertemu-Tawaran-Riset>, diakses pada 10 Januari 2017.

terhadap prinsip-prinsip GESI. Tujuan membumikan riset-riset “langitan” dari kampus agar lebih tepat guna dalam perspektif GESI mesti disyaratkan untuk menghormati prinsip keadilan gender. Jika tidak, penerapan teknologi baru tersebut justru akan menyingkirkan peran dan posisi perempuan. Dalam kasus proyek Revolusi Hijau pada era 1980-an misalnya, intensifikasi pertanian, yang salah satunya melakukan intervensi teknologi dalam pertanian, terbukti justru menyingkirkan perempuan dari sektor ini. Sebab, Revolusi Hijau justru memfasilitasi kian dominannya peran laki-laki dan tersubordinasinya kelompok perempuan.

Pemaknaan selanjutnya dilakukan pada istilah “rekayasa sosial” yang cukup sering diulang dalam *Buku Panduan Edisi IX*. Istilah ini dianggap sebagai wujud dari penelitian terapan pada ilmu sosial-humaniora yang terdengar lebih “berguna” bagi implementasi program pembangunan yang bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Chamber (1987) menyebutnya sebagai penelitian tentang prasangka-prasangka orang luar yang tidak peka terhadap kesenjangan kekuasaan antara subjek yang diteliti dengan si peneliti. Sering kali, dalam menyusun rekayasa sosial, peneliti memiliki bias modernitas dengan menganggap ilmu pengetahuan mereka lebih mumpuni dibandingkan pengetahuan subjek penelitian. Dalam konteks Revolusi Hijau, Chamber (1987) dan Sajogyo (1991) memberikan contoh bahwa rekayasa sosial memang tidak ditujukan bagi orang yang paling marginal. Bahkan, “kadang-kadang penelitian tentang jenis tanaman pangan... bukan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan kalori penduduk miskin, melainkan untuk meningkatkan keuntungan usaha peternakan... karena bisa diperdagangkan” (Chamber, 1987: 100). Rekayasa sosial cenderung buta dalam melihat diferensiasi sosial penduduk lapisan bawah dan lapisan atas, serta proses polarisasi yang terjadi karena proyek pembangunan.

Istilah “rekayasa sosial” berangsur-angsur ditinggalkan bahkan oleh pencetusnya karena cenderung memanipulasi (J. Fitcher [1957] dalam Wiradi [1996]). Sayangnya, istilah ini justru muncul berulang-ulang dan menjadi acuan dalam kerangka hibah penelitian bagi seluruh universitas di Indonesia. Alih-alih mendudukan penelitian sebagai upaya untuk menjelaskan masalah sosial berdasarkan tuturan masyarakat sendiri tentang

hal paling genting di mata mereka, *Buku Panduan Edisi IX* justru meletakkan penelitian sebagai pelaksana bagi pendekatan karitatif dari pembangunan. Contohnya, kemiskinan dilihat sebagai masalah yang datang dari luar, seperti karena bencana alam atau kurangnya modal. Maka, intervensi kebijakan berikut praktik penelitiannya menyesuaikan pendekatan dengan mengamini program-program yang sifatnya karitatif dan berdampak langsung. Penelitian juga harus selaras dengan anggapan bahwa seluruh masyarakat memiliki hasrat kompetisi yang sama menuju keadaan yang lebih modern. Bahkan, masyarakat berdasarkan kacamata *Buku Panduan Edisi IX* dibayangkan sebagai individu-individu wirausaha. Dengan demikian, seolah “penelitian memosisikan subjek yang diteliti sebagai golongan sasaran atau objek yang dibodohkan dan tidak tahu-menahu tentang dirinya” (Sajogyo, 1991).

Pemaknaan ketiga adalah penelitian harus bersifat praktis dengan menghindari analisis yang rumit dan bertele-tele agar bisa berdampak positif bagi pembangunan. Sifat praktis ini sejalan dengan hasil penelitian yang bias ilmu eksakta karena berorientasi pada produk yang penyebarluasannya berdasarkan mekanisme jual-beli. Dalam nalar demikian, penelitian tidak diposisikan sebagai peningkatan kesadaran kritis atau transformasi sosial. Penelitian justru diposisikan sebagai pemberi legitimasi bagi proyek pembangunan dan, dalam hal ini, tidak didudukan sebagai bagian dari masalah, melainkan solusi bagi kesejahteraan masyarakat. Mendudukan penelitian seperti itu tentu saja naif. Seolah-olah tidak ada ruang yang bebas bagi peneliti untuk mengelaborasi persoalan ketimpangan dalam penelitian sosial-humaniora.

Selain itu, penelitian yang seyogyanya menjadi kekuatan untuk menjelaskan realitas sosial, sering kali justru melakukan depolitisasi terhadap agenda pembangunan. Di sini, realitas sosial dibayangkan tidak punya langgam historis. Perubahan sosial dan kemiskinan seolah tidak hadir dari gejolak dan pertarungan antargolongan dalam trajektori sejarah suatu komunitas tertentu. Ferguson (1994) menyebutnya sebagai penciptaan mitos (*myth-making*) yang ahistoris tentang perubahan sosial. Contohnya, Bank Dunia menghadirkan realitas sosial Lesotho pada 1980-an sebagai masyarakat tani tradisional yang subsisten, meskipun sejatinya modernisasi membawa dampak pada proletarisasi desa

dan ketiadaan akses atas tanah (Ferguson, 1994: 176). Dengan demikian, negara meletakkan penelitian sebagai agen pembangunan yang merepresentasikan sikap netral dan general dengan instrumen pembangunan ditempatkan bebas nilai sebagai penyedia jasa pelayanan sosial dan insinyur pertumbuhan (Ferguson, 1991).

Pemaknaan tersebut berkaitan erat dengan makna keempat bahwa penelitian yang praktis harus memiliki kedekatan dengan pasar dan industri. Hal ini begitu gamblang disebutkan dalam *Buku Panduan Edisi IX*, terutama pada skema hibah pengabdian masyarakat. Dalam skema ini, persoalan masyarakat yang salah satunya kemiskinan, seolah bisa diatasi dengan melibatkan warga negara yang menjadi subjek penelitian ke dalam ekonomi pasar. Perekonomian dengan karakter ini oleh Polanyi (1992, dan 2005 [dalam Edelman, ed.]) diterjemahkan sebagai “sistem ekonomi yang dikontrol, diregulasi, dan diarahkan oleh pasar mulai dari ranah produksi hingga distribusi barang yang dipercayakan melalui mekanisme yang mengatur sendiri secara mekanis (*self-regulating*)”.

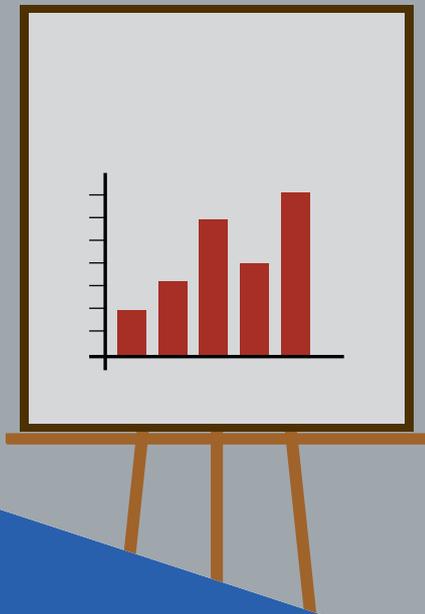
Istilah *self-regulating* merupakan metafor yang digunakan Adam Smith untuk menjamin beroperasinya ekonomi pasar yang kompetitif. Seolah, setiap orang yang terlibat dalam sistem pasar memiliki kebebasan individual untuk mengekspresikan kepentingan masing-masing. Kata “*self*” membayangkan sistem ekonomi

akan bekerja secara “otomatis” untuk menemukan “harmonisasi” (Skousen, 2007). Tak heran bila *Buku Panduan Edisi IX* menganjurkan setiap penelitian untuk mendorong pelibatan industri yang memosisikan subjek peneliti semata-mata sebagai warga bermental wirausaha. Asumsi ini sangat bias kesenjangan ekonomi politik lantaran mengasumsikan seluruh manusia memiliki kemampuan natural untuk berkompetisi dalam mencari keuntungan semaksimal mungkin.

*Self-regulating* bergantung pada pemisahan sistem ekonomi dalam sistem sosial politik. Kegiatan dan perhitungan khusus ekonomi benar-benar dipisahkan dan diisolasi dari kehidupan riil. Sebab, nalar yang sedang dibangun adalah ekonomi pasar hanya akan bekerja pada masyarakat pasar pula. Setiap industri dibangun untuk memproduksi barang jual yang kemudian menjadi subjek yang berinteraksi langsung dengan mekanisme *supply-demand* dan harga. Sebab itu, penelitian dengan asumsi tersebut terhubung dengan makna-makna sebelumnya: bahwa penelitian harus mengabdikan pada pembangunan. “Pengabdian” ini dilakukan melalui pengusaha prototipe produk penelitian agar bisa dikomersialisasi dan disebarluaskan setelah disuntik investasi. Asumsi tersebut berdasarkan anggapan bahwa fenomena ekonomi yang berjalan mekanis itu berlangsung layaknya fenomena alam. Alih-alih menekankan pada keadilan, penelitian justru menganggap individu-individu dalam mekanisme pasar yang ditawarkan pembangunan, berjalan harmonis.

# 3

## Elaborasi Visibilitas GESI dalam Laporan Penelitian Terpilih



### A. Membaca GESI dalam Riset Kemenristekdikti 2013-2015

Untuk mengetahui bahwa hasil penelitian Kemenristekdikti dalam kurun 2013-2015 mengadopsi isu gender sebagai perspektif, paradigma, metode riset, dan/atau subjek penelitian, “gender” dipilih sebagai kata kunci utama bersama enam kata kunci lain. Pemilihan tersebut disandarkan pada konsep dasar dan standar dalam studi gender, serta tujuan ilmu pengetahuan.

Enam kata kunci tersebut adalah “gender” (“peran gender”, “pembagian kerja gender”, “ketidakadilan gender”, “alat analisis gender”, dan “arus utama gender”), “peran”/“peranan”, “miskin”/“kemiskinan”, “relasi kuasa”/“kekuasaan”, APKM (“Akses Partisipasi Kontrol dan Manfaat”/“konsep analisis gender”),

“perempuan”/“wanita”, dan “disabilitas”/“difabilitas”. Dengan demikian, terdapat tujuh kata kunci atau 1+6 kata kunci<sup>8</sup> untuk membedah apakah sebuah penelitian di perguruan tinggi/Kemenristekdikti telah memenuhi kebutuhan dasar pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

Ketujuh kata kunci tersebut telah dipakai untuk memindai, meninjau, membedah muatan, dan kekuatan topik penelitian akademisi atau dosen di perguruan tinggi/Kemenristekdikti. Alasan menggunakan enam kata kunci selain kata kunci utama “gender” adalah keenam kata tersebut dinilai sebagai alat dan cara (*tool* dan *method*) untuk mengungkap persoalan ketimpangan struktural dan sistemik dalam kajian ilmu sosial-humaniora dengan menggunakan keadilan gender sebagai paradigmanya. Dengan cara itu, perspektif gender sebagai alat analisis semakin berdaya dalam menyelami sebuah karya akademik hasil penelitian. Apalagi jika dikaitkan dengan isu inklusi sosial dengan gender sebagai alat analisis, hal tersebut dapat mempertajam cara membaca diskriminasi berbasis “eksklusi sosial” melalui pemahaman soal pola relasi kuasa di dalam masyarakat, yang sudah tak asing dalam analisis gender. Sejauh ini inklusi sosial dianggap sebagai alat yang bisa membantu menjelaskan topik-topik berperspektif gender dalam penelitian di perguruan tinggi/Kemenristekdikti. Enam kata kunci tersebut sebenarnya merupakan alat untuk mengungkap persoalan struktural dan sistemik dalam memahami politik tata kuasa yang kerap tak mengindahkan keadilan gender dan menciptakan eksklusi sosial dalam suatu bangunan masyarakat (*societal building*)—dan dalam sebuah penelitian.

Di luar itu, isu yang menarik dan menjadi topik riset skema hibah Kemenristekdikti belakangan berjalan dalam kerangka untuk menjawab dua tantangan. *Pertama*, di dunia riset yang secara global sarat dengan kompetisi.<sup>9</sup> *Kedua*, di bidang industri dengan Indonesia belakangan ini masuk ke kelompok “*emerging countries*” yang diharapkan bisa menjaga pertumbuhan

8 Dalam beberapa penyebutan, kadang dibaca 1+6 (baca: satu plus enam) kata kunci, kadang tujuh kata kunci.

9 Di kalangan akademisi dan kampus/perguruan tinggi, berkembang atmosfer kompetisi untuk meraih ranking *world-class campus*. Hal semacam ini menjadi *drive point* bagi peneliti kampus dan akademisi dalam mencapai ranking tersebut.

dan menggunakan teknologi industri untuk mengangkat potensi ekonomi. Pertanyaannya, apakah riset yang dikembangkan untuk mengejar ranking tersebut tak menganggap penting aspek humaniora? Sudah jelas bahwa kemiskinan, ketidakadilan gender, dan eksklusi atas akses terhadap kebutuhan dasar (air, pangan, energi, plus keadilan agraria) kelompok marginal, merupakan persoalan yang susah dipecahkan dari “menara gading” teori-teori pembangunan. Padahal, jika masalah tadi tidak terbaca, apalagi tersentuh, sulit untuk memecahkannya. Jika demikian, berarti ada yang luput dari “gir teori” pengetahuan sebagai mekanisme “tindakan saintifik” (atau sikap ilmiah)<sup>10</sup> dan realitas kehidupan manusia. Entah itu metodologi, tujuan, atau perspektif teori itu sendiri, yang enggan menyentuh persoalan pembangunan.

Membedah persoalan kemiskinan selalu terkait dengan pola relasi kuasa yang berlaku dalam struktur dan sistem sosial suatu masyarakat. Sementara itu, perempuan—yang diposisikan mikro—menjadi elemen yang “ter(di-)lupakan” dalam taksonomi persoalan sosial. Pengelompokan persoalan sosial itu tak terbaca dengan utuh dalam relasinya dengan tata kuasa. Padahal, kemiskinan dan perempuan adalah persoalan sosial yang beririsan. Jika sebuah pembahasan menyoal kemiskinan dalam masyarakat melepaskan perempuan sebagai topik kajian, hasilnya akan mendegradasi perangkat bacanya karena tak lagi utuh menangkap kemiskinan yang sebenarnya. Perempuan sebagai kelompok sosial dianggap dekat dengan “peristiwa harian” proses pemiskinan yang terjadi dalam masyarakat,<sup>11</sup> baik di perdesaan, perkotaan, maupun

subkultur masyarakat pedalaman.

Pemenuhan keadilan gender seharusnya selalu terkait dengan isu peran perempuan di sektor-sektor penting, seperti akses terhadap hak-hak dasar (air, pangan, energi, plus keadilan agraria), guna mengakhiri proses pemiskinan. Demikian pula ketika pengertian keadilan gender dimaknai sebagai pembagian peran dan akses antara perempuan dan laki-laki secara berimbang, serta menghormati tata-nilai yang beradab dan berperikemanusiaan. Namun dalam kajian dan penelitian sebagai tindakan saintifik atau sikap ilmiah, penyelesaian persoalan sosial terkadang melewatkan kaum perempuan atau tidak menyertakan mereka, baik sebagai subjek perubahan maupun subjek kajian.

Sebenarnya perempuan telah jamak dimengerti oleh banyak kalangan sebagai kelompok yang menanggung beban ganda dalam pembangunan. Kemiskinan di masyarakat yang berlangsung setiap hari menjadi persoalan yang tak tersuarakan, yang membuat mereka menerima beban ganda tersebut. Hal tersebut terkadang disebabkan oleh peminggiran persoalan yang dihadapi perempuan sejak dalam rumah tangga hingga di masyarakat.

Peminggiran merupakan persoalan yang dihadapi perempuan sehari-hari dalam proses sosial di masyarakat. Sering kali hal ini berupa data-data mikro yang tak mudah dibaca dengan oleh “kamera *obscura*” penelitian. Peran perempuan jarang dianggap sebagai bagian dari proses sosial dalam pemecahan persoalan di masyarakat. Hal itu menyebabkan terlepasnya pembahasan masalah perempuan dari pembacaan strukturalnya. Demikian pula dalam persoalan akses perempuan terhadap hak-hak dasar, seperti sumber pangan, air, energi, dan keadilan agrarian. Relasi tata kuasa yang terbatas bagi kelompok ini rupanya menyebabkan kemiskinan tetap langgeng dalam masyarakat. Sebab itu, kata kunci “gender” menjadi alat baca yang penting bersama enam kata kunci lainnya untuk membedah hasil riset perguruan tinggi/Kemenristekdikti—sebagai tindakan ilmiah kelompok ilmuwan yang ingin menghasilkan formulasi pemecahan masalah masyarakat modern saat ini.

Dengan berbekal satu kata kunci utama, yaitu “gender”, plus enam kata kunci pembedah, tim studi melakukan

10 “Sikap ilmiah atau tindakan saintifik” yang dimaksud adalah sikap dan tindakan kaum profesional berdasarkan keahlian (*expertise*) dan spesialisasinya untuk melakukan kontrol sosial dalam masyarakat—dalam hal ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Kelompok elite, sebagaimana dijelaskan Suzanne Keller (1963), terbentuk oleh empat proses sosial, antara lain, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kelompok spesialisasi jabatan. Lalu, pertumbuhan organisasi formal dan birokrasi, serta perkembangan keragaman moral. Lihat Keller, *Beyond the Ruling Class: the role of the strategic elites in modern societies* (1963), yang telah diterjemahkan menjadi *Penguasa dan Kelompok Elite—Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern* (1984), Raja Grafindo: Jakarta.

11 Lihat Ben White mengelaborasi hasil SAE (Survei Agro-Ekonomi) dalam “*Measuring time allocation, decision-making, and agrarian changes affecting rural women: examples from recent research in Indonesia*”. Makalah diterbitkan dalam *IDS Bulletin*, Vol. 15 No. 1, 1984.

kajian hasil riset perguruan tinggi/Kemenristekdikti yang terjaring dalam skema dana hibah penelitian pada 2013-2015. Kajian mulanya dilakukan dengan memindai masing-masing judul naskah riset (pada 2013 ada 6.536 naskah riset; tahun 2014 sebanyak 12.654; dan 2015 mencapai 12.450), kemudian membedah dan meninjaunya mulai dari bagian abstrak, metodologi, rumusan masalah, dan objek penelitian—hingga, jika diperlukan, hasil atau kesimpulan riset. Proses ini dilakukan dengan membaca satu demi satu naskah penelitian yang masuk kriteria untuk dibedah setelah terpindai kata kunci “1+6” ke dalam topik GESI. Hasilnya dipaparkan berdasarkan paduk (*baseline*) tahun periode seperti di bawah ini.

### Paduk 2013

Paduk (*baseline*) 2013 berisi 6.536 naskah riset. Namun materi yang dapat dibaca hanya abstraknya. Adapun rumusan masalah, metodologi, dan tujuan atau kesimpulan laporan tidak terdapat dalam data hasil riset yang tersedia sehingga tidak dapat dibaca. Naskah hasil riset yang utuh dalam bentuk salinan elektronik (*soft copy*) maupun salinan cetak (*hard copy*) tidak ditemukan. Dengan keterbatasan tersebut, studi ini menggunakan abstraksi yang telah dijilid rapi untuk dibedah berdasarkan kategori masing-masing naskah terpilih. Naskah tersebut kemudian dipindai dengan menggunakan tujuh kata kunci yang telah ditetapkan di awal.

Proses pemindaian relatif tidak sulit. Namun setelah naskah terpilih ditentukan dan dikelompokkan berdasarkan muatan topik “gender”, tim studi mengalami kendala untuk memahami bangunan penelitian secara keseluruhan. Pada sebuah naskah terpilih tidak diperoleh satu valuasi utuh mengenai muatan GESI. Dalam ungkapan lain, pada paduk hasil riset skema 2013, tidak ditemukan naskah utuh untuk dibaca dan dianalisis secara memadai. Yang tersedia hanya abstrak sehingga paduk 2013 tidak begitu kuat untuk didalami atau bahkan sekadar dipindai.

Walaupun hanya mengandalkan abstrak, temuan tentang kata kunci “perempuan” dan “pemiskinan” relatif banyak ditemukan dibandingkan dengan kata kunci lain. Ini menunjukkan penelitian 2013 relatif sudah menyasar kelompok perempuan dan kemiskinan

sebagai topik utama penelitian. Adapun kata kunci “gender” ditemukan dalam kurang dari 50 judul hasil riset dari 6.536 naskah yang hanya dapat dibaca melalui abstraknya.

Meski topik-topik kemiskinan dalam riset hibah Kemenristekdikti 2013 banyak muncul, namun cara pandang terhadap kemiskinan belum peka terhadap prinsip-prinsip GESI. Padahal, dampak terbesar dari proses pemiskinan, khususnya dalam perspektif kemiskinan struktural, dihadapi kelompok perempuan. Mereka adalah kelompok sosial yang banyak menerima dampak buruk dari pemiskinan. Kemiskinan struktural di perdesaan akibat dikuasanya sumber-sumber kekayaan agraria oleh segelintir orang, menyebabkan sulitnya atau bahkan hilangnya akses perempuan terhadap sumber-sumber tersebut.<sup>12</sup> Begitu pula dalam kasus perampasan tanah (*land grabbing*) oleh perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

Dengan merujuk pada abstrak yang terseleksi dalam paduk 2013, hanya sedikit naskah yang menjelaskan atau mengaitkan gender dan kemiskinan. Kata “gender” sering kali hanya menjadi kategori sosial pelengkap, yang biasanya digunakan sebagai penanda pembeda kelamin secara teknis atau, bahkan, dikutip sekadarnya tanpa menautkan pada pengalaman perempuan dalam struktur sosial yang patriarkis. Selain itu, penggunaan kata “perempuan” pada abstraksi terpilih hanya digunakan sebagai pelengkap, alih-alih sebagai subjek riset. Ini kurang lebih sama seperti yang terjadi pada kata kunci “gender”.

Dari abstraksi yang dibaca, tim studi jarang menemukan pertanyaan “mengapa” sebagai indikasi rumusan masalah yang tegas. Hal ini menimbulkan pra-asumsi bahwa penelitian di perguruan tinggi/Kemenristekdikti pada 2013 tidak dibuat untuk menjawab persoalan struktural masyarakat, atau membedah tata kuasa yang timpang di dalam masyarakat.

Kata kunci “gender” pada judul umumnya diletakkan sebagai perspektif dan konsep penelitian. Juga, digunakan dalam beragam topik dan multidisipliner

<sup>12</sup> Misalnya, kasus di desa-desa sekitar industri air kemasan (AMDK) di Sukabumi, Jawa Barat. Akses perempuan terhadap kebutuhan dasar air bersih terhambat akibat penguasaan sumber mata air oleh swasta, yakni perusahaan Danone Groups.

(politik, ekonomi, teknologi, sosial-budaya). Namun, sebagian kelompok judul dengan kata kunci “gender” tidak digunakan sebagai perspektif dan konsep. Kata kunci tersebut berposisi sebagai subjudul, syarat atau pelengkap, dan tujuan penelitian. Ketika “wanita” dijadikan kata kunci, sebagian besar memosisikan perempuan sebagai objek penelitian. Sehingga, ujungnya adalah perempuan semata-mata dikaitkan dengan perlunya penguatan dan peningkatan peran, tanpa dihubungkan dengan analisis sebab-musabab mereka sebagai korban pembangunan.

Hampir dipastikan, semua naskah yang menyebut kata “wanita” berangkat dari asumsi bahwa tujuan pembangunan sudah otomatis membawa dampak positif bagi perempuan dan laki-laki sekaligus. Tak ditemukan naskah abstrak yang melihat pembangunan yang bias gender berdampak beda terhadap laki-laki dan perempuan, atau berdampak lebih buruk terhadap perempuan. Sebaliknya, dalam beragam program dan kebijakan pembangunan kelompok perempuan hanya menjadi objek pemberdayaan. Asumsi dasarnya belum beranjak dari paradigma WID, yakni perempuan dianggap tertinggal, tidak mandiri, dan sulit

berkembang, sehingga perlu ditolong melalui program karitatif pembangunan. Penggunaan kata “wanita” juga merupakan penegasan atas stigma tentang perempuan sebagai subordinat dari laki-laki dalam pembangunan. Sehingga, pendekatan GESI menjadi relevan sebagai rancang dasar, seperti desain riset, bingkai, dan cara pandang bagi riset-riset Kemenristekdikti ke depan.

#### **Paduk 2014**

Peningkatan jumlah laporan riset dalam skema hibah 2014 cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Ada 12.654 naskah riset yang diinventarisasi dan dimasukkan ke dalam satu paduk, dengan naskah penelitian Kemenristekdikti pada periode ini dapat dibaca dengan baik.

Dari 12.654 judul penelitian, kata kunci “gender” ditemukan 53 kali sebagai bagian dari redaksional judul atau topik sentral penelitian. Beberapa di antaranya memosisikan “gender” sebagai perspektif penelitian, beberapa lainnya merupakan syarat pelengkap penelitian dan/atau tujuan penelitian. Berikut ini contoh “gender” sebagai perspektif, syarat pelengkap, dan tujuan atau objek penelitian.

#### **“Gender” sebagai Perspektif**

No	Judul	Peneliti	PT	Skema
	Model Komunikasi Lingkungan Berperspektif <b>Gender</b> dalam Menyelesaikan Konflik Lingkungan di Perkotaan ( <b>Peran Aktivistis Perempuan</b> dalam Pengelolaan Konflik Lingkungan Secara Berkelanjutan)	Donna Asteria	Universitas Indonesia	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

#### **“Gender” sebagai Syarat Pelengkap**

No	Judul	Peneliti	PT	Skema
	Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Hukum <b>Gender</b> Struktural bagi <b>Perempuan</b> Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten	Benny Irawan	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Penelitian Hibah Bersaing

#### **“Gender” sebagai Objek Penelitian**

No	Judul	Peneliti	PT	Skema
	Integrasi <b>Gender</b> dalam Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bantul	Oktiva Anggraini	Universitas Widy Mataram	Penelitian Hibah Bersaing

Dari sekian kata kunci yang beririsan dengan “gender”, ada kata kunci yang lebih sering muncul bersama “gender” pada paduk 2014, yakni “akses”, “perempuan”, dan “kemiskinan” sebagaimana tertera dalam judul penelitian di bawah ini.

penumbuhan keadilan gender dalam penelitian Kemenristekdikti, baik sebagai subjek penelitian maupun alat analisis, tidak begitu nyaring berbunyi. Perbandingan jumlah kata kunci “perempuan”/”wanita” dan “peran”/”peranan” yang timpang, mencerminkan

NO	Judul	Peneliti	PT	Skema
	Pengkajian Ketidaksetaraan <b>Gender</b> Melalui Komunikasi Keluarga untuk Meningkatkan <b>Akses</b> Pendidikan bagi Anak <b>Perempuan</b> dalam Lingkaran <b>Kemiskinan</b> di Kawasan Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan	Jeanny Maria Fatimah	Universitas Hasanuddin	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

Penyebutan kata kunci “perempuan” dan “peran” mendapat perhatian dari tim studi. Kata kunci “perempuan” terdapat pada 107 judul. Jika kata kunci tersebut digabungkan dengan kata kunci “wanita”, yang jumlahnya 50, totalnya menjadi 157 judul penelitian yang memuat topik perempuan. Tim studi menilai kata kunci “peran” menjadi indikator inklusi sosial diberlakukan dalam membaca persoalan pada penelitian di perguruan tinggi/Kemenristekdikti. Kata kunci “peran” bila disatukan dalam satu frasa dengan “perempuan”, akan memunculkan subjek penelitian yang mengedepankan pelibatan, penyertaan, dan akomodasi peran sosial perempuan (inklusi sosial). Dengan demikian, kata kunci “peran” semestinya bisa dengan mudah dijumpai bersanding dengan “perempuan” meski hasilnya tidak selalu demikian. Buktinya, kata “peran” terdapat pada 186 judul penelitian, sedangkan kata “peranan” ada pada 57 judul penelitian. Sehingga, kata “peran” dan “peranan” tersebar di 243 judul penelitian.

penelitian di perguruan tinggi/Kemenristekdikti kurang berdaya dalam membedah persoalan ketimpangan berbasis gender dan relasi tata kuasa. Sehingga, ekspektasi awal bahwa jumlah kata kunci “perempuan”/”wanita” dan “peran”/”peranan” tidak terpaut jauh ternyata keliru. Semestinya, terjadinya inklusi sosial terhadap perempuan dan kesetaraan gender yang tercermin dari banyak judul penelitian di perguruan tinggi/Kemenristekdikti yang menyinggung perempuan dan peranannya, akan termuat sebanyak jumlah kata “peran” dan “peranan”. Berdasarkan pemindaian, kata “peran”/”peranan” jauh lebih banyak dari “perempuan”/”wanita”—243 judul berbanding 157 judul.

Di sinilah indikasi bahwa inklusi sosial melalui

Kata kunci “wanita” memiliki fungsi teknis dan pelengkap penjelasan hasil penelitian yang terkait dengan tubuh. Setiap penyebutan “wanita” hampir selalu diikuti dengan penjelasan teknis alat reproduksi, kesuburan, dan objek terapan pengetahuan biologis kesehatan. Contohnya seperti terdapat pada judul di bawah ini.

No	Judul	Peneliti	PT	Skema
1	Efikasi Suplementasi Vitamin D, Kalsium dan Susu terhadap Perbaikan Serum 25 (OH) dan Sindrom Metabolik Pekerja Garmen <b>Wanita</b> Usia Subur	Dodik Briawan	Institut Pertanian Bogor	Penelitian Strategis Nasional
2	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Peningkatan Fertilitas pada <b>Wanita</b> Pasangan Usia Subur di Provinsi Kalimantan Barat	M. Taufik	Universitas Muhammadiyah Pontianak	Penelitian Dosen Pemula

Ada juga beberapa judul penelitian dengan menggunakan kata “peran” dan “wanita” yang menempatkan perempuan seperti yang tertangkap dalam makna kata “wanita” yang menjadi elan pemberdayaan untuk dikaji dan diteliti, seperti dapat dibaca dalam judul penelitian berikut ini.

tujuan pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan, pemakaian perspektif gender dan GESI belum utuh digunakan dari awal riset hingga penulisan akhir laporan. Program pemberdayaan perempuan masih dikaitkan dengan target “angka” (kuantitatif) dan belum masuk pada tujuan “makna”. Padahal, dalam

NO	Judul	Peneliti	PT	Skim
1	Pengaruh Budaya, <b>Peran</b> dalam Rumah Tangga, Transportasi, dan <b>Akses</b> yang Rendah akan Sumber Daya terhadap Keberhasilan Penerapan Program Peningkatan <b>Peran Wanita</b> menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Mekani Vestari	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah	Penelitian Dosen Pemula
2	<b>Peran Wanita</b> Pedagang Sayur di Pasar Tradisional Kecamatan Sungailiat Bangka dalam Membentuk Pola Pemasaran dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Rostiar Sitorus	Universitas Bangka Belitung	Penelitian Dosen Pemula

Pada paduk 2014, ada 14 judul naskah penelitian yang dibaca substansinya. Ke-14 judul tersebut dipilih dari proses pemindaian dan pengelompokan kombinasi dua sampai tiga kata kunci. Dari pembacaan tersebut, tim studi melihat lima hal. *Pertama*, judul riset banyak menggunakan kata “model” sebagai konsep penting. Misalnya, “*model pemberdayaan perempuan atau model pengentasan kemiskinan*”. *Kedua*, seperti pada 2013, dari abstrak dan rumusan masalah jarang ada pertanyaan “mengapa” yang sebenarnya ditujukan untuk menjawab akar persoalan ketimpangan gender secara historis dan analisis gender.

Berikutnya, *ketiga*, banyak bertebaran konsep-konsep kunci yang secara sengaja atau tidak sengaja justru tidak dibarengi dengan definisi konseptual. Contohnya, “*apa itu strategi kebutuhan gender?*”, “*apa itu pembagian kerja?*” dan “*apa itu kemiskinan buruh perempuan?*” Akibatnya, konsep-konsep tersebut tidak bisa dihadirkan sebagai penjelasan atas persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. *Keempat*, kurangnya definisi membawa riset pada simplifikasi persoalan. Akhirnya, beberapa judul terpilih justru meloncat pada pemodelan seolah-olah *output* riset merupakan invensi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah dan industri. *Kelima*, gagasan tentang partisipasi dalam riset yang berisi model dan bagan tak lebih dari partisipasi relasi pasar atau rekayasa sosial.

Meskipun telah muncul beragam riset dengan

mempersoalkan kemiskinan, sulit mengabaikan posisi perempuan di perdesaan maupun perkotaan, yang populasinya kini lebih banyak dari laki-laki.

#### Paduk 2015

Pada 2015, penerima hibah penelitian Kemenristekdikti hampir sama jumlahnya dengan periode sebelumnya. Jumlahnya mencapai 12.450 naskah riset. Angka ini menjadi paduk 2015 dengan kondisi naskah dapat dibaca dengan baik.

Paduk 2015 terdiri dari 12.069 naskah (*batch 1*), dan 381 naskah (*batch 2*). Dari seluruh naskah, totalnya terdapat 56 judul penelitian menggunakan kata kunci “gender” sebagai topik penelitian. Konsep gender cukup familiar digunakan dalam penelitian karya sastra untuk membaca bagaimana pembeda perempuan dan laki-laki secara sosial dikonstruksi dalam teks. Di samping bacaan terhadap karya sastra, gender sebagai konstruksi sosial begitu kental dalam penelitian tentang metode pengajaran, pelayanan publik, dan partai politik. Pada penelitian tersebut, gender dilihat sebagai pembeda sosial, alih-alih sebagai alat untuk membaca ketimpangan sosial yang dipengaruhi “jenis kelamin” sosial.

Dari 12.450 naskah penelitian, terdapat 102 judul menggunakan kata kunci “perempuan”. Dalam daftar judul penelitian Kemenristekdikti, kata “perempuan”

digunakan sebagai objek pembangunan negara. Tema penelitian tersebut di antaranya:

1. Kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi yang mengontrol tubuh perempuan;
2. Aspirasi politik perempuan melalui partai dan musyawarah penentu kebijakan komunitas;
3. Perempuan sebagai tenaga kerja murah pabrik dan tenaga kerja murah migran;
4. Perempuan sebagai korban dari kekerasan rumah tangga dan perdagangan manusia;
5. Perempuan sebagai penggerak ekonomi kewirausahaan berbasis keterampilan domestik dari bahan olahan pangan.

Adapun kata kunci “wanita” terdapat pada 39 judul. Kata “wanita” dalam judul-judul penelitian Kemenristekdikti lebih dekat dengan dimensi:

1. Kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi yang mengontrol tubuh perempuan;
2. Wanita dilihat secara esensial sebagai perawat keanekaragaman hayati;
3. Wanita sebagai objek pembangunan penggerak ekonomi kewirausahaan dan pinjaman mikro.

Ada 128 judul penelitian yang menggunakan kata kunci “miskin”/”kemiskinan”. Kata “miskin” banyak disandingkan dengan model-model pelebagaan ekonomi sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan tidak dilihat sebagai persoalan struktural, melainkan dianggap sebagai akibat dari ketiadaan akses terhadap modal semata. Sehingga, dalam kacamata para peneliti tersebut, bila seseorang miskin, ia bisa bersaing dalam pasar bebas selagi memiliki akses terhadap modal. Kentara sekali dimensi penelitian kemiskinan didekati dengan solusi-solusi taktis melalui kredit mikro bagi usaha kecil menengah, pinjaman rumah tangga, zakat bagi si miskin, dan pemberdayaan ekonomi berupa peningkatan keterampilan untuk pendapatan rumah tangga.

Kata kunci “miskin”/”kemiskinan” banyak digunakan untuk mendekati persoalan dengan kacamata pelayanan publik pemerintah, seperti akses kesehatan, pendidikan, perumahan sehat, dan pangan murah. Akses

ini dihadirkan dengan menyertakan peran pihak swasta seperti perusahaan jasa keuangan, baik syariah maupun konvensional, institusi pemerintah; dan masyarakat. Model-model kolaborasi ini mengasumsikan setidaknya tiga hal, yaitu:

1. Definisi masyarakat miskin sebagai kelompok paling rentan seolah hadir tanpa perdebatan;
2. Hubungan kolaborasi antara kelompok miskin, penyedia jasa keuangan, dan pemerintah hadir dalam hubungan setara tanpa relasi kuasa;
3. Kelompok miskin dibayangkan tidak memiliki gender tersendiri yang berdampak pada peniadaan pengalaman kerentanan dan marginalisasi pada kasus perempuan miskin.

Dari 128 tajuk penelitian yang menggunakan kata kunci “miskin”/”kemiskinan”, hanya delapan judul yang berkaitan dengan kata kunci “perempuan” atau “gender”. Elaborasi antara kemiskinan, perempuan, dan gender pada penelitian tersebut seperti mengafirmasi pola-pola penyeragaman kasus atau pengalaman rumah tangga miskin menjadi satu pengalaman semata-mata kepala keluarga seperti pada pendataan pemerintah. Delapan judul penelitian tersebut bertema akses pendidikan, akses ekonomi mikro, dan akses kesehatan reproduksi-kontrasepsi. Perempuan dalam kedelapan penelitian itu menjadi objek pemberdayaan agenda pembangunan dan pengentasan kemiskinan dalam kerangka pengembangan ekonomi mikro, agrobisnis, dan pemberantasan buta huruf yang datang searah (*top-down*).

Berdasarkan analisis awal tentang saling-silang beragam kata dalam judul penelitian perguruan tinggi/ Kemenristekdikti periode 2015, terlihat bahwa konsep gender dan inklusi sosial tidak lepas dari pendekatan “pembangunanisme”. Pendekatan ini diperkenalkan ke negara-negara dunia ketiga, sejatinya untuk mengaburkan tata kuasa dan kontestasi antaraktor dalam persoalan publik. Topi-topik tentang gender sekadar pelengkap dengan ruang publik perempuan dibuka seluas-luasnya untuk memenuhi kebutuhan pasar atas konsumen dan tenaga kerja murah. Tak heran bila elaborasi beragam kata di atas mengerucut pada:

1. Kewirausahaan dan kredit mikro yang diurus perempuan;
2. Partisipasi politik praktis dalam kebijakan publik;
3. Intervensi negara terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Anggapan bahwa dimensi tata kuasa sedikit terlihat dari judul-judul berkata kunci “gender” dan “perempuan” memang benar belaka. Hanya dua dari sebelas judul menggunakan kata “kuasa” yang mencoba membahas tentang gender/perempuan dan kuasa.

Dari paduk 2015, ditemukan hal yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. *Pertama*, digunakannya “model” sebagai tajuk utama. Misalnya, “*model pengentasan kemiskinan berbasis gender*” atau “*model pemberdayaan ekonomi wanita*”. *Kedua*, penggunaan model pada judul, berujung pada minimnya penjelasan atas pertanyaan “mengapa” dalam rangka menyoal kaitan gender dan kemiskinan. Dengan menghindari pertanyaan “mengapa”, riset pun akan berjarak terhadap persoalan struktural dan relasi kuasa.

*Ketiga*, kurangnya definisi konseptual mengenai GESI membawa riset pada simplifikasi persoalan. Akhirnya, beberapa judul terpilih justru meloncat pada pemodelan menjadi seolah-olah keluaran riset yang bisa ditawarkan kepada pemerintah atau industri sebagai sebuah rekayasa (*engineering*). Beberapa atau mungkin kebanyakan dari para ahli ilmu sosial tidak setuju dengan penyelesaian persoalan sosial dengan cara menerapkan rekayasa sosial. Sebab, hal tersebut tak mendasar untuk dilakukan dalam menuntaskan suatu persoalan.

*Kelima*, penggunaan model baik disengaja atau tidak justru menganggap perempuan dan kemiskinan sebagai objek rekayasa sosial. Hal ini membuat perempuan miskin menjadi entitas paling lemah yang harus diintervensi dalam program-program pembangunan yang bersifat *top-down*. Program ini biasanya bernama pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan penghasilan perempuan. Alih-alih “pengetahuan” menciptakan dan mendorong pemecahan persoalan di masyarakat dari bawah ke atas (*bottom-up*), yang terjadi malah ketidakberdayaan untuk memecahkan

persoalan yang ada di masyarakat—sebagai implikasi dari pendekatan pola-pola pemodelan.

Tujuan riset yang bertujuan untuk pemodelan dan rekayasa sosial tak memiliki kepekaan terhadap prinsip GESI. Setidaknya, masih menggunakan “gender” secara abstrak. Sebab, dalam asumsi pemodelan dan rekayasa sosial tersebut laki-laki dan perempuan dianggap sama dan setara. Belum lagi soal mazhab pengetahuan mengenai siapa yang digunakan dalam pemodelan dan rekayasa sosial tersebut. Dominasi ilmu sosial yang positivistik mengasumsikan bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) adalah entitas sosial yang bisa dibentuk, diubah, dan direkayasa seperti “mesin”. Tak heran jika kemudian terjadi beragam subordinasi atas peran dan posisi perempuan dalam pembangunan yang bermazhab ilmu sosial positivistik.

## B. Hasil Analisis Kuantitatif Visibilitas GESI dalam Skema Penelitian Kemenristekdikti 2013-2015

Metode analisis data lain yang digunakan untuk mengetahui kekentaraan gender dalam skema hibah penelitian Kemenristekdikti 2013-2015 adalah pendekatan secara kuantitatif. Walaupun sebagian besar riset itu berbasis pendekatan sosial dengan metode kualitatif, namun pendekatan tersebut tidak selalu tepat—jika yang dikehendaki ialah pola valuasi menyeluruh (*holistically value*). Sebaliknya, metode kuantitatif tidak selalu bersifat “*naive positivists*”, bahkan pada suatu analisis konstruksi sosial, peran sosial tersebut dapat diukur dan dinilai (Scott dan Scott, 2010).

Tim studi memilih mengombinasikan kedua metode tersebut karena banyaknya kriteria untuk menilai bobot dan kualitas riset bertema inklusi sosial, terutama gender (GESI). Berdasarkan Bryman dkk. (2008), kombinasi tersebut sanggup untuk saling “merespons” dan “memonitor” kualitas informasi yang dihasilkan dari pengolahan data.

Pada studi ini, analisis kuantitatif sangat mungkin dilakukan karena data dasar yang disediakan oleh Kemenristekdikti berbentuk numerik dengan ragam variabel yang dapat dinilai dengan skor/angka. Misalnya, jumlah total penerima hibah secara berturut-

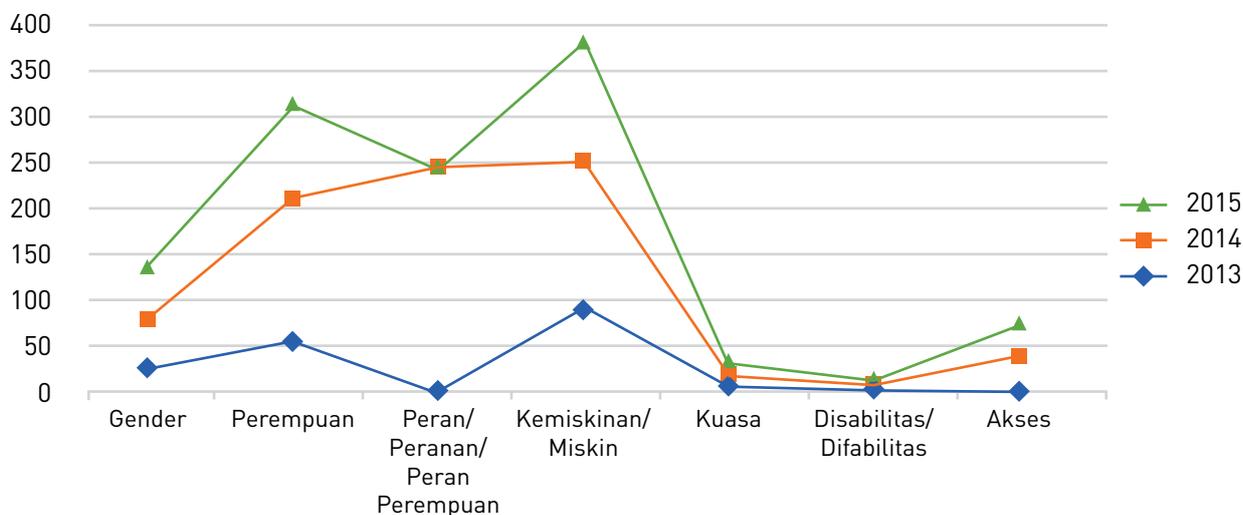
turut adalah 6.537 judul pada 2013; 12.654 judul (2014); dan 12.450 judul (2015). Sepintas dengan jenis data ini, perbandingan menjadi hal lumrah dihasilkan oleh sebuah analisis kuantitatif. Sehingga, patut disayangkan, hal yang umum terjadi dalam kuantifikasi pada penelitian gender adalah kecenderungan untuk hanya melihat jumlah laki-laki dan perempuan. Kesimpulan tentang makna “setara” akan dilihat jika hasil valuasi mengarah pada porsi atau jumlah yang sama atau mendekati sama. Jika hasil ini muncul, posisi laki-laki dan perempuan dapat dinyatakan sudah sejajar walaupun hanya berdasarkan jumlah.

Pemaknaan yang keliru ini menjadi tantangan dalam melakukan penelitian ini. Kombinasi dengan pelingkupan kata kunci menghasilkan tujuh kata kunci yang sering muncul pada penelitian skema hibah Kemenristekdikti dalam kurun 2013-2015. Tujuh kata kunci tersebut adalah “gender”, “perempuan”, “peran”/”peranan”, “kemiskinan”/”miskin”, “kuasa”, “disabilitas”/”difabilitas”, dan “akses”. Pada **Gambar 3**, ada tiga periode waktu untuk melihat tren penggunaan ketujuh kata kunci tersebut. Secara keseluruhan, pada 2013 peminat riset gender dan inklusi sosial hanya separuh dari jumlah riset pada 2014 dan 2015. Ini berarti terjadi kenaikan dua kali lipat minat untuk meneliti tema tersebut. Menariknya, selama kurun tiga tahun tersebut, kata “gender” yang dekat dengan tema

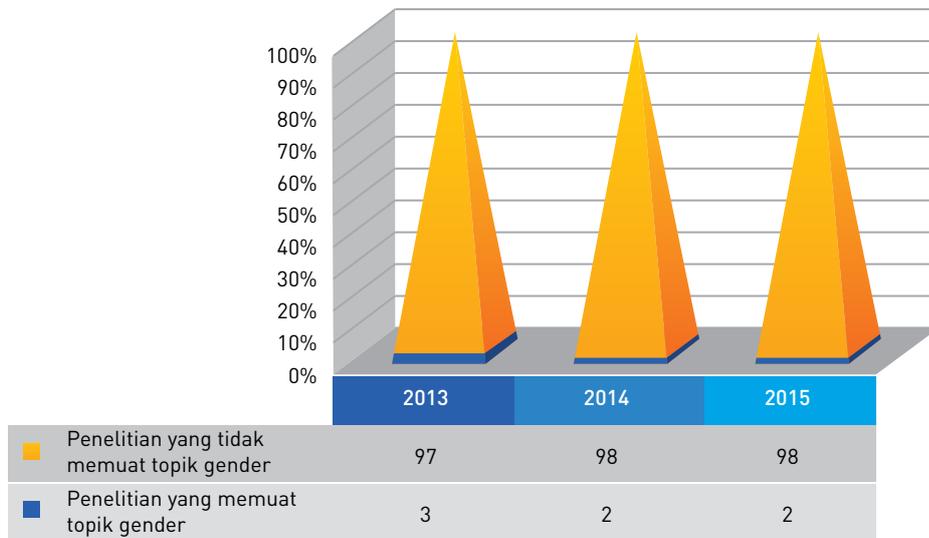
gender dan sosial justru tidak sebanyak jumlah kata “perempuan” dan “kemiskinan”/”miskin”. Hal ini yang menjadi dasar asumsi bahwa pemaknaan penelitian dengan tema gender dan inklusi sosial justru dikaitkan dengan perempuan dan kemiskinan. Setelah ditelusuri lebih lanjut dengan metode pemindaian, riset gender hanya berfokus pada masalah perempuan. Atau dengan kata lain, kata “gender” pasti menggunakan “perempuan” sebagai objeknya. Sedangkan riset sosial banyak membahas masalah kemiskinan sebagai objeknya.

Jika topik yang ditelaah hanya soal gender tanpa mengindahkan topik yang lebih umum, yaitu sosial, minat riset terhadap tema tersebut hampir tidak ada, yakni hanya sebesar 2-3 persen (lihat **Gambar 4**). Sebaliknya, riset yang tidak memuat topik gender sangat diminati dan mendominasi lebih dari 90 persen tema riset skema hibah Kemenristekdikti selama 2013-2015. Rinciannya, dari 6.537 judul riset pada 2013, hanya 182 judul yang berkaitan dengan penelitian gender dan inklusi sosial. Begitu juga pada dua tahun berikutnya, walaupun penerimaan proposal meningkat hampir 50 persen. Namun porsi penelitian yang berkaitan dengan gender dan inklusi sosial tidak pernah beranjak dari angka 5 persen. Temuan ini dikaji ulang dengan melihat buku panduan untuk calon peneliti penerima dana hibah Kemenristekdikti.

**Gambar 3. Tren Studi Gender dan Inklusi Sosial dalam Skema Hibah Penelitian Kemenristekdikti 2013-2015**



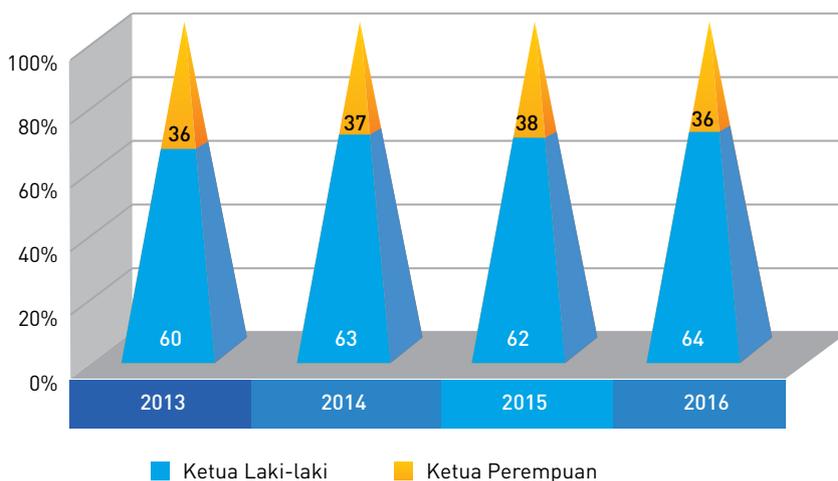
**Gambar 4. Perbandingan Penelitian yang Memuat Topik Gender dan Non-Gender dalam Skema Hibah Kemenristekdikti 2013-2015**



Hasil pengkajian ulang terhadap buku panduan skema hibah Kemenristekdikti menemukan sejumlah terminologi yang “antipenelitian sosial” atau dalam studi ini disebut dengan “riset lunak” (*soft-research*). Keberpihakan terhadap “riset keras” (*hard-research*), yang merupakan kebalikan dari penelitian sosial, cukup kentara. Terminologi yang digunakan sebagai standar buku panduan skema hibah lebih mudah dipahami peneliti. Keterangan lebih lanjut mengenai temuan hasil pengkajian ulang akan dijelaskan secara rinci pada bagian yang lain.

Dominasi riset yang lebih banyak memberikan jalan bagi “*hard-science*” (ilmu tentang alam) adalah awal penting untuk mengukur sejauh mana prinsip GESI dijadikan pertimbangan serius dalam riset. Pengusung “*hard-science*” umumnya lebih menitikberatkan pada bagaimana teknologi bisa tepat guna dan diterapkan di lapangan namun jarang mempersoalkan keadilan gender. Sehingga, penting bagi riset yang menggunakan pendekatan “*hard-science*” diwajibkan juga memasukkan prinsip GESI.

**Gambar 5. Perbandingan Peneliti Penerima Hibah Kemenristekdikti Berdasarkan Jenis Kelamin**



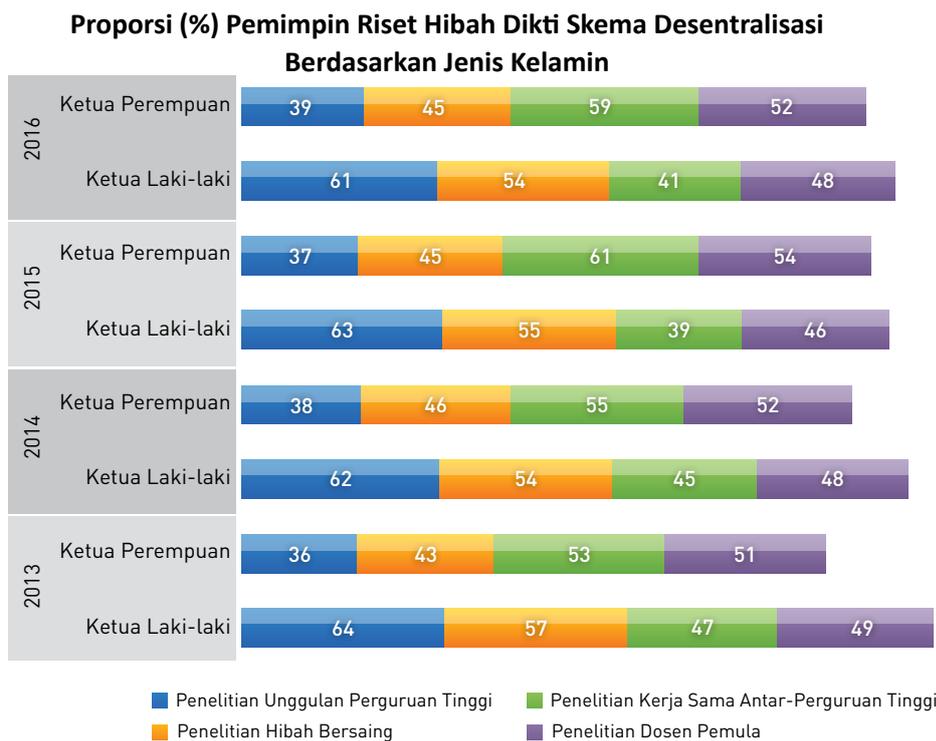
Berdasarkan proporsi jenis kelamin, jumlah peneliti perempuan dalam skema hibah ini tidak sebanding dengan jumlah peneliti laki-laki. Peneliti perempuan berjumlah sekitar 40 persen (lihat **Gambar 5**). Walaupun tidak bisa dikatakan setara, porsi tersebut cukup berimbang dan stabil selama tiga tahun. Artinya, angka tersebut konsisten.

Jika peran dan kepemimpinan dijadikan parameter, kemunculan peran gender sebagai pemimpin riset penting untuk dilihat. Karena banyaknya skema hibah Kemenristekdikti, tim studi mengambil sampel tiga besar skema hibah mulai 2013 hingga 2016, yaitu skema desentralisasi (**Gambar 6a**), skema kompetisi nasional (**Gambar 6b**), dan skema pengabdian (**Gambar 6c**). Dari data itu dapat dilihat bahwa jumlah peneliti perempuan sebagai pemimpin proyek riset belum sebanding dengan jumlah peneliti pria, paling banyak hanya berkisar 40 persen. Sampai titik ini, dalam hal jumlah, peran perempuan di dunia kepemimpinan riset belum dapat dianggap setara dengan laki-laki. Sebab itu, melihat peran gender pada setiap subskema juga perlu dilakukan. Hal ini untuk melihat kecenderungan perempuan yang “berani” mengambil bagian sebagai pemimpin penelitian.

Pada skema desentralisasi (lihat **Gambar 6a**), perempuan sebagai pemimpin riset cenderung ada pada subskema “Penelitian Hibah Bersaing” dan “Penelitian Pemula”. Perbandingannya sekitar 45:55—cukup menggambarkan keseimbangan jumlah pada dua subskema tersebut. Namun pada dua skema lainnya, yaitu “Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi” dan “Penelitian Antar-Perguruan Tinggi”, laki-laki mendominasi dengan porsi rata-rata 60:40. Ini menggambarkan kurangnya peran perempuan sebagai pemimpin proyek riset.

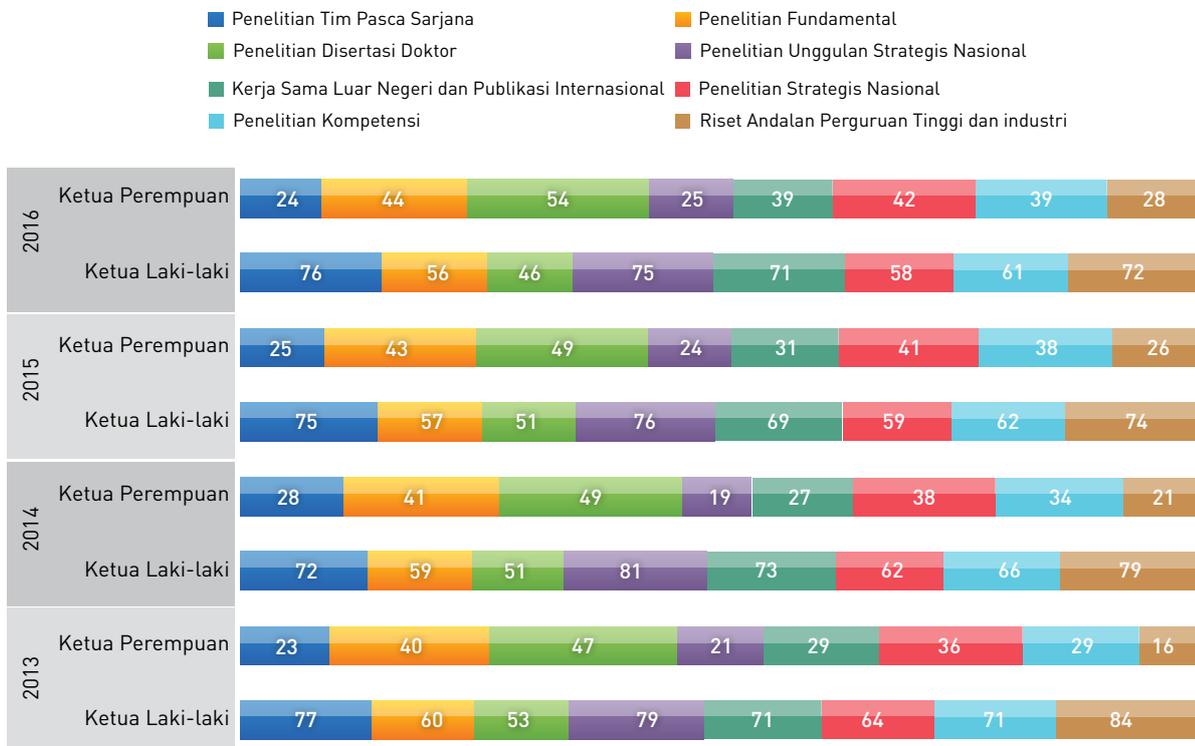
**Gambar 6b** memperlihatkan peran gender dalam hal kepemimpinan proyek riset pada skema kompetisi nasional. Skema ini memuat subskema yang bersifat teknis dan berskala luas, seperti “Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional”, “Penelitian Unggulan Strategis Nasional”, “Penelitian Strategis Nasional”, dan “Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri”, serta “Penelitian Kompetensi”. Pada semua riset tersebut, peran laki-laki sebagai pemimpin cenderung mendominasi hingga angkanya mencapai 70-80 persen. Hanya pada subskema “Penelitian Fundamental” dan “Penelitian Disertasi Doktor” pemimpin perempuan dan laki-laki berbagi porsi seimbang.

**Gambar 6a. Proporsi Pemimpin Riset Skema Desentralisasi Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Gambar 6b. Proporsi Pemimpin Riset Skema Kompetisi Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Proporsi (%) Pemimpin Riset Hibah Dikti Skema Kompetisi Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin**



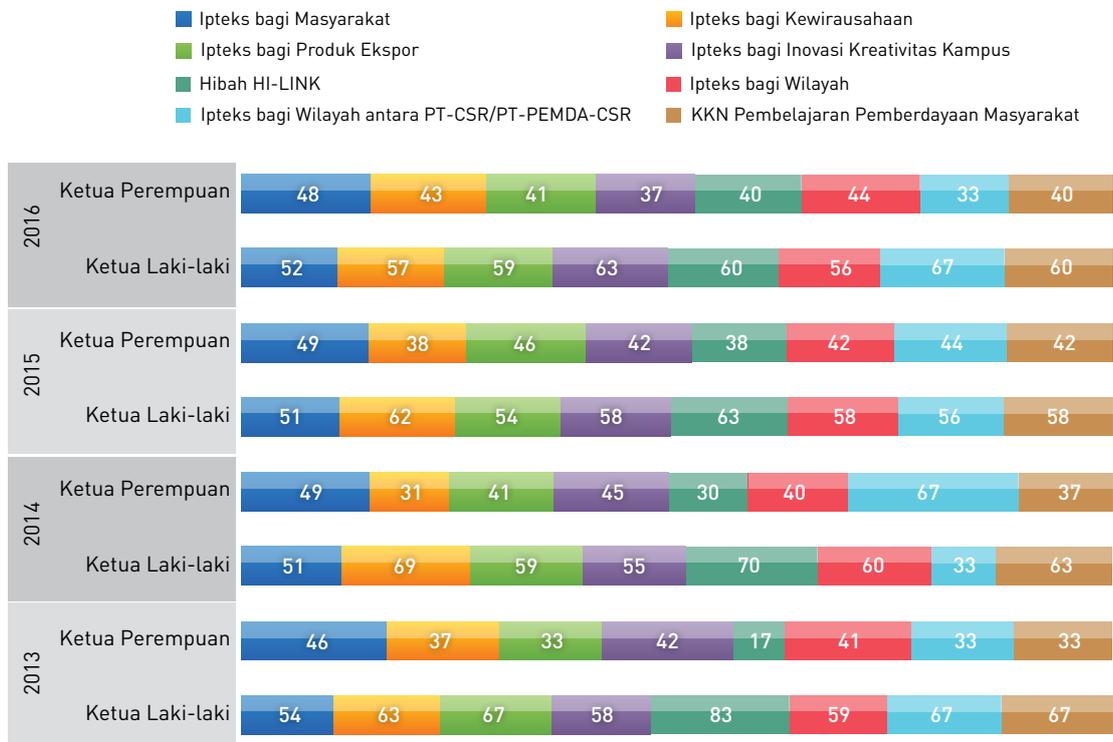
Skema terakhir yang dijadikan sampel adalah skema pengabdian (lihat **Gambar 6c**). Skema ini berkebalikan dengan skema sebelumnya: tidak terlalu teknis dan bukan untuk skala luas. Dapat ditebak, pola-pola kepemimpinan perempuan banyak muncul dalam skema ini. Walaupun belum dapat dikatakan seimbang berdasarkan jumlah, tapi angkanya hampir sama. Pada 2013, jumlah pemimpin perempuan sekitar 30 persen. Namun sejak 2014 angkanya terus meningkat.

Hasil analisis yang menggambarkan sedikitnya peran perempuan sebagai pemimpin proyek riset tidak serta-merta mengerucut pada kesimpulan bahwa ini merupakan sebuah masalah. Namun pola bahwa

perempuan mungkin “percaya diri” untuk muncul sebagai pemimpin dapat dibaca dengan analisis ini. Bagaimana pun, pada akhirnya perlu ada pengkajian ulang secara kualitatif pada tiap subskema sehingga justifikasi tidak hanya berdasarkan hasil penghitungan secara kuantitatif (Bryman dkk., 2008). Seperti yang dilakukan oleh McAdam dan Olzak (2012), sebuah penggambaran riset sosial dengan yang ditemukannya pola (dalam hal ini adalah riset gender), hendaknya dikaji sekali lagi. Walaupun secara spesifik penelitian GESI ini tidak merujuk pada metode analisis isi, namun mengecek silang kebenaran dengan melihat subskema bisa melihat alasan di balik munculnya pola-pola tersebut.

**Gambar 6c. Proporsi Pemimpin Riset Skema Pengabdian Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Proporsi (%) Pemimpin Riset Hibah Dikti Skema Pengabdian Berdasarkan Jenis Kelamin**





# 4

## Diskusi, Refleksi, dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejumlah dokumen, studi ini mencatat sejumlah hal. Di antaranya:

1. Secara umum perhatian terhadap penggunaan analisis gender sebagai salah satu perangkat bantu untuk melihat subjek riset masih langka. Beberapa studi telah menggunakan kata “gender”, “wanita”, dan “perempuan”. Namun dalam pembahasannya, analisis yang memanfaatkan gender sebagai instrumen penelitian dan kelompok yang menerima dampak positif atau negatif dari subjek yang diteliti, tidak muncul signifikan.
2. Dalam subjek studi bidang pengabdian masyarakat, isu gender tidak digunakan sebagai titik berangkat terjadinya kesenjangan berbasis gender dan disabilitas. Sehingga, penentuan perempuan sebagai sasaran pendampingan tidak berbasis data yang menunjukkan kesenjangan gender. Dengan kata lain, penunjukan perempuan sebagai kelompok dampingan didasarkan pada faktor kebetulan atau *common sense* yang tidak kritis.
3. Karena GESI belum atau bahkan tidak dikenali sebagai alat analisis, penelitian yang dibiayai dalam skema hibah Kemenristekdikti tak menghasilkan rekomendasi yang secara substantif bisa mengatasi kesenjangan gender dan disabilitas. Demikian pula dalam kaitannya dengan inovasi pengetahuan yang tepat guna. Tak terdapat hasil penelitian yang merekomendasikan temuan teknologi yang dapat mengatasi kesenjangan berbasis prasangka atau praktik diskriminasi gender. Padahal senetral apa pun sebuah kajian, bila subjek kajiannya menyangkut kehidupan manusia, niscaya akan berpengaruh pada laki-laki dan perempuan, serta orang dengan disabilitas dan tanpa disabilitas. Masalahnya terletak pada sejauh mana alat analisis yang digunakan sanggup meneropong kesenjangan gender dan memperbaikinya.
4. Dari temuan awal, sangat penting untuk membuka ruang diskusi. *Pertama*, mengenai ruang riset ditawarkan Kemenristekdikti kepada para peneliti di perguruan tinggi di Indonesia. Studi ini mencatat kecenderungan menawarkan ruang riset yang terbatas pada kajian dengan pendekatan yang bias ilmu pengetahuan alam atau sains. Hal ini tampak dari bangunan teori, pembuktian riset, dan keluaran yang dituntut melahirkan inovasi baru. Sampai titik itu sebetulnya tidak tepat untuk menuntut lahirnya inovasi-inovasi baru. Namun, parameter penentuan inovasi tersebut cenderung bias ilmu pengetahuan alam. Dan meskipun dituntut untuk melahirkan inovasi yang tepat guna, tetapi karena sejak awal tak dipandu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan inovasi yang dapat mengatasi kesenjangan gender, hal tersebut menyebabkan temuan dan rekomendasi yang ditawarkan para peneliti cenderung buta gender dan mengabaikan kebutuhan orang dengan disabilitas. Problem lanjutan dari pendekatan penelitian yang cenderung positivistik menyebabkan bidang humaniora yang sebenarnya bisa mengkaji persoalan gender dan kemungkinan

menghasilkan inovasi sosial yang adil dan sensitif gender, juga tidak muncul.

5. Diskusi *kedua* berkaitan dengan pertanyaan: sejauh mana tema-tema keadilan gender terlihat pada tren riset Kemenristekdikti 2013-2015? Kajian ini menemukan bahwa dalam sejumlah studi istilah “gender” telah digunakan sebagai kategori sosial. Namun penggunaan istilah dan konsep gender itu cenderung dibatasi konsep pelibatan perempuan dalam pembangunan, yang berangkat dari ideologi yang bias “pembangunanisme”. Hal ini membuat substansi riset mengarahkan perempuan sebagai objek agenda pembangunan dan rekayasa sosial yang menekankan model-model peningkatan pendapatan rumah tangga atau dukungan terhadap kapasitas perempuan agar terserap pasar tenaga kerja atau konsumen. Dari semua riset yang menyoal isu perempuan atau menggunakan gender sebagai kategori sosial, tidak ditemukan riset yang menggunakan gender sebagai alat analisis. Ini dilihat dari relasi struktural dan bagaimana hal itu berdampak pada marginalisasi dan subordinasi perempuan yang pada gilirannya menghambat akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol mereka terhadap pembangunan. Mereka terperangkap dalam kuasa yang didasarkan pada perbedaan akses yang disebabkan gender.

Dari uraian di atas, ada beberapa catatan yang layak dipertimbangkan oleh Kemenristekdikti dalam menyusun kembali Panduan Penerimaan Hibah untuk perbaikan riset ke depan.

- (1) Diperlukan optimalisasi riset di Kemenristekdikti, baik yang bernuansa sains maupun humaniora, yang melihat gender sebagai “alat analisis” utama yang mempertimbangkan hubungan struktur dan kekuasaan (*power relation*) sebagai alat analisisnya ketimbang sekadar membahas peranan perempuan yang tak dihubungkan dengan musabab terjadinya kesenjangan.

- (2) Mengubah anggapan bahwa riset dengan kata kunci “perempuan” merupakan subjek penelitian yang penting, bukan sampingan. Demikian halnya ketika menyasar perempuan sebagai subjek penelitian. Penelitian hendaknya didorong untuk meluaskan konteksnya bukan hanya pada perannya dalam

pembangunan yang bercorak stereotip terhadap perempuan—dengan perempuan diasumsikan sebagai warga negara yang harus didekati dengan pendekatan belas kasihan atau karitatif. Namun, harus diletakkan dalam kerangka pemenuhan hak asasi sebagai manusia yang setara dengan warga negara lainnya.

- (3) Mengembangkan riset-riset akademik berperspektif gender yang berguna sebagai mata rantai “pengetahuan-ke-kebijakan” (*knowledge to policy*) dengan berangkat dari bukti yang kokoh. Riset tersebut untuk mengatasi persoalan-persoalan pembangunan yang menghubungkan kesenjangan sosial yang dihadapi kaum miskin, perempuan, dan difabel—kaum yang termarginalkan oleh pembangunan dalam kerangka makro sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya, hubungan antara meningkatnya praktik perkawinan anak perempuan di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, penyebaran penyakit menular seksual, serta perubahan ruang hidup dan agraria yang masif dan tumpul dalam melihat dampaknya secara sosial ekonomi. Alat analisis gender niscaya bisa meneropong dampak pembangunan yang menyengsarakan, sekaligus mencari jalan keluar untuk menghindari dampak yang lebih buruk.

- (4) Ada pembelajaran yang baik dari upaya Kemenristekdikti dalam pengarusutamaan gender dengan adanya beragam jenis riset. Antara lain dalam menyambungkan riset dengan pengabdian masyarakat dan melakukan tindakan afirmatif dengan memprioritaskan kelompok perempuan sebagai penerima manfaat riset. Hal ini menunjukkan bahwa hasil riset Kemenristekdikti memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Hanya tinggal disajikan alasan yang tepat dan berdasarkan data serta analisis gender untuk memastikan bahwa penunjukan perempuan sebagai penerima manfaat tersebut bukan tak berbasis riset. Upaya ini mengakomodasi tujuan riset Kemenristekdikti sebagai bagian tak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satu pilarnya adalah pengabdian masyarakat.

Persoalan karakter kepemimpinan di internal Kemenristekdikti juga memengaruhi arah dan pilihan prioritas program dan kepekaan terhadap GESI dalam ragam riset Kemenristekdikti. Sejak 2015, Kemenristekdikti telah mengembangkan kebijakannya

seperti terdapat dalam buku panduan terbaru, yang memberi ruang lebih luas bagi topik riset tentang gender. Begitu pun ruang bagi peneliti perempuan yang juga akan diperluas. Niat dan rencana ini dapat menjadi indikator penting bahwa persoalan GESI di dalam ruang riset Kemenristekdikti ke depan akan mendapat perhatian lebih serius dan diprioritaskan.

## Rekomendasi

Dengan mendasarkan pada batasan ruang lingkup, tujuan, dan temuan studi, ada beberapa rekomendasi untuk agenda ke depan.

1. Perubahan paradigmatis dalam seluruh kebijakan riset agar lebih inklusif, empatik, transformatif, serta peka terhadap prinsip keadilan gender (dari orientasi “ *understanding*” menuju “*social transformation*”) dalam ragam riset Kemenristekdikti.
2. Menghubungkan riset kebijakan berdimensi gender dengan upaya mengatasi masalah ketimpangan struktural berdimensi akses pada sumber daya, termasuk isu agraria. Sebab, persoalan keadilan gender tidak hanya dalam ranah hak berdemokrasi dan bernegara, tetapi juga terkait dengan keadilan atas akses pada sumber-sumber agraria dan kedaulatan atas ruang hidup.
3. Menyeimbangkan peluang riset keilmuan “*hard-science*” (ilmu alam) dengan “*soft-science*” (ilmu sosial dan humaniora). Sebab, studi tentang GESI membutuhkan penjelasan yang bersifat kualitatif dan eksploratif di samping tetap mengakomodasi data-data penguat secara kuantitatif. Dalam waktu bersamaan, riset keilmuan “*hard-science*” mesti sensitif gender, tidak lagi netral apalagi buta terhadap relasi gender guna mengatasi kesenjangan berbasis GESI.
4. Menyelenggarakan program pilot ruang riset di Kemenristekdikti yang menggunakan perspektif GESI secara utuh pada seluruh tahapan riset. Dengan kata lain, perspektif GESI diterapkan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
5. Mengembangkan ruang kompetisi atau penghargaan bagi ragam riset dengan topik gender berbasis masalah lokal. Inisiatif semacam ini terbukti mampu mendorong munculnya beragam riset dan kompetisi yang sehat para peneliti pada beragam tingkatan.
6. Mengembangkan kerja sama riset Kemenristekdikti dengan lembaga atau organisasi riset berbasis komunitas atau masyarakat lokal. Eksperimen ini bermanfaat untuk studi jangka panjang dengan fokus tertentu. Sehingga, pemahaman atas fakta empiris dan dinamika lokal tertangkap lebih utuh. Pada gilirannya, pengambilan kebijakan berbasis riset semacam ini dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta terhindar dari “*politics of ignorance*” (sikap politik pengabaian) dalam pengambilan kebijakan.
7. Menyusun program berkelanjutan dalam bentuk sekolah singkat atau lokakarya metodologi riset Kemenristekdikti yang berperspektif GESI secara utuh guna menghasilkan kurikulum dan pedoman bagi semua jenis riset Kemenristekdikti.
8. Meluaskan isu perempuan dan GESI bukan hanya pada skema pengabdian, tetapi juga pada semua skema riset Kemenristekdikti. Sehingga, riset tak sekadar memasukkan isu perempuan sebagai “angka”, tapi juga “makna”.

# PROFIL PENULIS

## Ciptaningrat Larastiti

Peneliti Sajogyo Institute, lulusan pascasarjana Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada. Sejak Oktober 2015, ia mengelola Program Beasiswa Studi Agraria dan Perempuan di Sajogyo Institute.

## Eko Cahyono

Peneliti dan Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (2015-sekarang). Alumni pascasarjana Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. Ia juga anggota staf pengajar di jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB. Bergiat dan belajar penelitian di Sajogyo Institute sejak 2007. Menekuni isu-isu agraria, pembaruan pedesaan dan krisis sosial-ekologis.

## Budiono Zaini

Selama empat tahun ke belakang ia melibatkan diri dalam riset-riset ilmu sosial. Sebelumnya pernah terlibat dalam riset pemetaan aktor politik lokal dalam *Power, Welfare, and Democracy* (2013), kerja sama UGM dan Oslo University, Norwegia. Agak ke belakang, ia pernah bekerja untuk sebuah lembaga sosial yang berkiprah dalam penanggulangan radikalisme-terorisme dan kekerasan atas nama agama (2011). Ia pun aktif dalam kerja-kerja sosial pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Minatnya terhadap mistisisme dan tasawuf mengantarkannya pada studi *Islamic Mysticism and Philosophy* di Islamic Collage for Advance Studies (ICAS)-Paramadina, Jakarta. Namun, ia kemudian memutuskan belajar langsung dari kampung ke kampung. Kini, sembari belajar dan bergiat dalam kajian agraria, pedesaan, dan adat di Sajogyo Institute, ia setia membawa “perangkat alat baca” untuk memahami tata-nilai yang menerbitkan kebijaksanaan dan pengetahuan kampung.

## Umi Latifah P.

Peneliti Sajogyo Institute. Ia alumni Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Selama beberapa tahun terakhir, ia mendalami isu kehutanan dan sumber daya alam berbasis sosial beserta tata kelolanya.

## Ihsan Maulana

Alumni jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB. Peneliti dan pengurus Divisi Pengelolaan Pengetahuan, Badan Eksekutif Sajogyo Institute.

# PROFIL SAJOGYO INSTITUTE



**Sajogyo Institute** adalah pusat studi dan dokumentasi agraria, kemiskinan, dan pembaruan pedesaan Indonesia. Lembaga yang didirikan pada 10 Maret 2005 ini bergerak dalam produksi dan layanan pengetahuan untuk kemajuan gerakan sosial dan perbaikan kebijakan agraria, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan di Indonesia.

**Kantor:**

Jalan Malabar No. 22, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, 16151

Telepon: (0251) 8374048

[www.sajogyo-institute.or.id](http://www.sajogyo-institute.or.id)

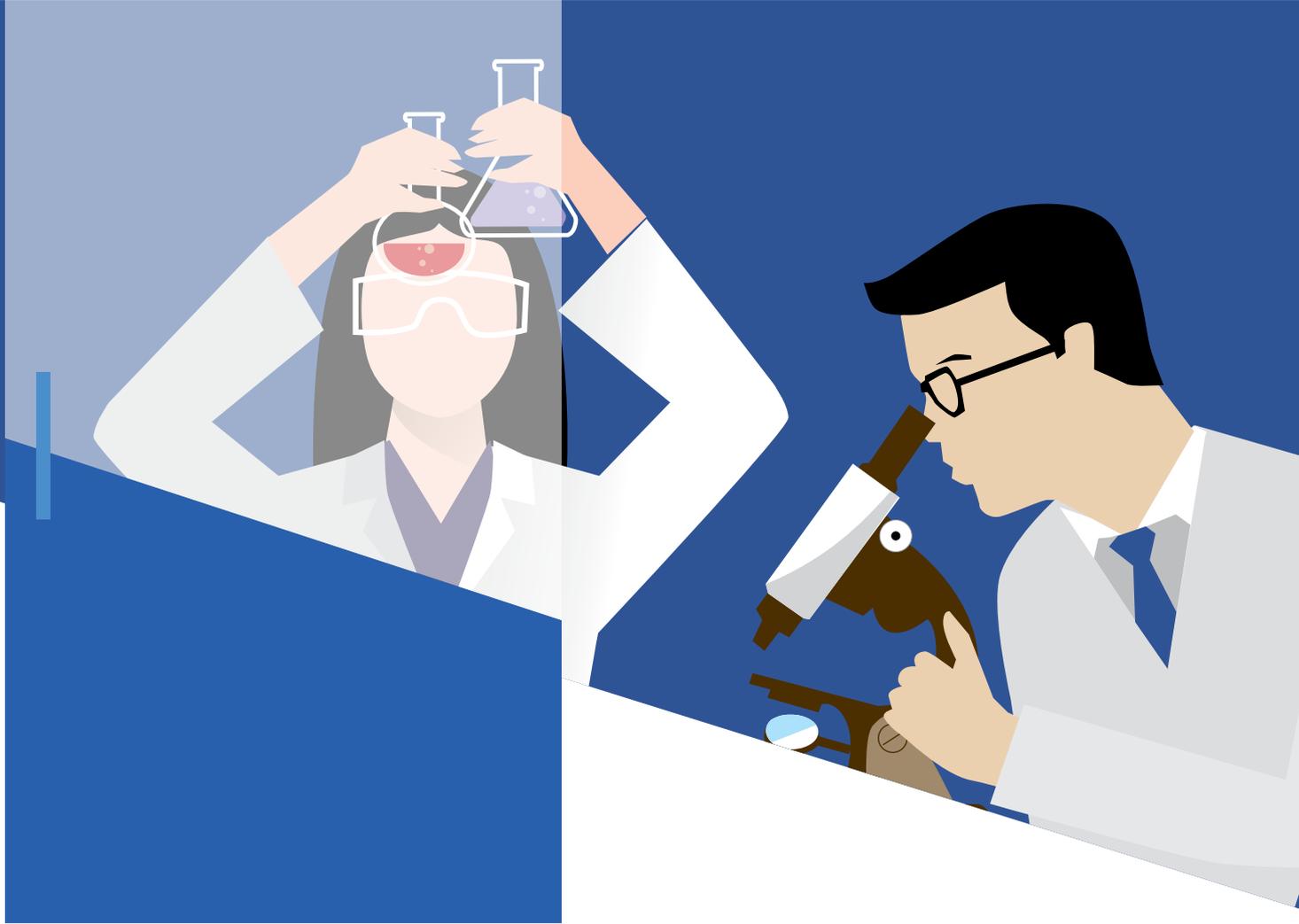
[eksekutif.sains@gmail.com](mailto:eksekutif.sains@gmail.com)

# DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S. 2008. Paradigma dan Revolusi Ilmu Dalam Antropologi Budaya: Sketsa Beberapa Episode. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Bryant, CGA. 1985. *Positivism in Social Theory and Research*. New York: St. Martin's Press.
- Bryman, A., Becker, S., Sempik, J., Bryman, A., Becker, S., & Sempik, J. 2008. Quality criteria for quantitative , qualitative and mixed methods research: A view from social policy. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(4), 261–276. (<http://doi.org/10.1080/13645570701401644>).
- Cornwall, Andrea. 2003. Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, Vol. 31, No. 8, pp. 1325–1342. (2).
- Department of Economic and Social Affairs. 2010. *Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context*. New York: United Nations Publication.
- DRPM [Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat]. (2013). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi. Edisi IX. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Faqih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Ferguson, James. 1991. The anti-politics machine: 'Development' and bureaucratic power in Lesotho (1994). *The Ecologist*, Vol. 24, No. 5.
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Filsafat Modern Dari Machievelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit—Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Raja Grafindo.
- McAdam, D., & Olzak, S. 2012. An old tool with new promise. *Contexts*, 11(1), 70–72. (<http://doi.org/10.1177/1536504212436505>).
- Polanyi, Karl. 1992. *The great transformation: the political and economic origins of our time*. Boston: Beacon Press.
- Razavi, Shavra dan Miller. 1995. From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse. *Occasional Paper UN*.
- Rinharz, Shulamit. 2006. *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Women Research Institute.
- Sadli, Saparinah. 1993. *Metologi Penelitian Berperspektif Wanita dalam Riset Sosial*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana-UI.
- Sajogyo. 1991. Sosiologi Terapan. Pidato ilmiah purna bakti Guru Besar IPB, Bogor.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1984. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: YOI.
- . 1993. Perkembangan Keluarga dalam Pembangunan Berkelanjutan: Suatu Analisa Tenaga Kerja Wanita dan Permasalahannya dalam Masyarakat Indonesia. Makalah Tim PSW LP-IPB.
- Scott, J., & Scott, J. 2010. Quantitative methods and gender inequalities. *International Journal of Social Research Methodology*, 13(July), 223–236. (<http://doi.org/10.1080/13645579.2010.482258>).
- Skousen, Mark. 2007. Adam Smith Declares an Economic Revolution in 1776 (Bab 1, hal. 3 - 45). Dalam *The Big Three in Economics*. Armonk. New York & London, England: M.E. Sharpe.
- Smith, Linda Tuhiwai. 2005. *Dekolonisasi Metodologi*. Yogyakarta: Insist Press.
- White, Ben. 1984. Measuring time allocation, decision-making, and agrarian changes affecting rural women: examples from recent research in Indonesia. Dalam *IDS Bulletin*, Vol 15 No.1.
- Wiradi, Gunawan. 1996. *Rekayasa Sosial dalam Menghadapi Era Industrialisasi Pertanian: Suatu Tinjauan Pembeding*.







---

## Knowledge Sector Initiative (KSI)

Ratu Plaza Office Tower 9th Floor

Jalan Jenderal Sudirman No. 9

Jakarta 10270 Indonesia

Phone : 62 21 7278 9921

Fax : 62 21 7278 9934

Email : [ksicommunication@ksi-indonesia.org](mailto:ksicommunication@ksi-indonesia.org)